

**LKjIP**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR**

**EVALUASI  
TAHUN 2021**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PU SUMBER DAYA AIR  
JL. GAYUNG KEBONSARI NO. 169  
SURABAYA

# KATA PENGANTAR

Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta menindaklanjuti Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, setiap tingkatan organisasi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta melaporkan capaian target sasaran program pembangunan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terwujudnya hasil-hasil (*outcome*) pembangunan baik dari sisi keuangan maupun kinerja organisasi.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai gambaran ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2021 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam Tahun 2021.

Evaluasi dan analisis kinerja yang dilakukan memperlihatkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai sesuai target sasaran program yang ditetapkan dalam tahun 2021, namun juga masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan sarana prasarana layanan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air ke depan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja sasaran program tahun 2021 dan jangka menengah 2019 – 2024 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur serta dapat dijadikan *lesson learned* untuk perbaikan-perbaikan ke depan.

Akhir kata, kami mengajak semua jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk bekerja keras, bekerja cerdas, jujur, dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan.

Surabaya, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Dr. MUHAMMAD ISA ANSHORI, ATD., MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700916 199403 1 006

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**BAB I    PENDAHULUAN ..... 1**

    A. STRUKTUR ORGANISASI ..... 1

    B. TUGAS DAN FUNGSI ..... 4

    C. ISU STRATEGIS ..... 6

    D. CASCADING KINERJA ..... 6

    E. PETA PROSES BISNIS ..... 11

    F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI ..... 34

**BAB II    PERENCANAAN KINERJA ..... 35**

    2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 – 2024 ..... 35

        2.1.1 TUJUAN ..... 35

        2.1.2 SASARAN ..... 37

        2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 38

    2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ..... 42

**BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA ..... 43**

    3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..... 43

        3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA ..... 43

        3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA ..... 47

        3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TERHADAP RPJMD ..... 48

        3.1.4 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI ..... 49

        3.1.5 ANALISA PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN ..... 54

        3.1.6 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA ... 56

    3.2 REALISASI ANGGARAN ..... 65

        3.2.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ..... 65



3.2.2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	66
.....		
3.2.3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air ...	67
3.3	<b>TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI</b> .....	67
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	68
4.1	<b>KESIMPULAN</b> .....	68
4.2	<b>LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG</b> .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

- A. FORM PENDANAAN INDIKATIF PADA RENSTRA
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
- C. REKAPITULASI DATA TAHUN 2021
- D. PETA PROSES BISNIS (BERDASAR RPJMD 2019 – 2024)



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Matriks Perubahan Kelembagaan dan Wilayah Kerja UPT .....	2
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan .....	37
Tabel 2.2	Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran .....	38
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2020 .....	42
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja .....	43
Tabel 3.2	Kinerja Bangunan Jaringan Irigasi .....	45
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja .....	47
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD .....	48
Tabel 3.5	Alokasi Per Sasaran Pembangunan .....	54
Tabel 3.6	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air Berdasarkan Pergub 61 Tahun 2016 .....	4
----------	---	---





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Evaluasi pada tahun 2021 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

### Visi dan Misi

Visi adalah gambaran atau pandangan masa depan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, sebagai harapan yang ideal dan memungkinkan untuk diwujudkan. Visi yang ditetapkan adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”***

Misi adalah pernyataan komprehensif tentang hal-hal yang hendak dicapai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan visi. Misi yang ditetapkan adalah mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.

Adapun hasil pengukuran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan :

Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Air mendapatkan nilai capaian sebesar 101,03 %.

- Sasaran 2 Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki :

Indikator Kinerja Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik mendapatkan nilai capaian sebesar 100,01 %.

- Sasaran 3 Meningkatkan Keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat :

Indikator Kinerja Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi mendapatkan nilai capaian sebesar 102,76 %.

- Sasaran 4 Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi :

Indikator Kinerja Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir mendapatkan nilai capaian sebesar 102,33 %.

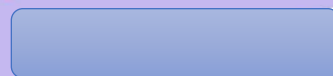
- Sasaran 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah :

Indikator Kinerja nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah mendapatkan nilai capaian sebesar 100,37 %.



**LKjIP 2021**

# BAB I PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah melalui proses *assesment* sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diambil keputusan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Pengairan (Nomenklatur sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014) berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dengan level Dinas Daerah Tipe A dimana Kepala Dinas (Es. IIa) membawahi Sekretaris (Es. IIIa) dan 4 (empat) Bidang setingkat Eselon IIIa.

Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang mulai berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2017.

Mengingat rentang kendalanya yang cukup luas meliputi 38 Kabupaten/Kota seluas 47.779,975 km<sup>2</sup> wilayah daratan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air ditunjang dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di 6 (enam) kota di Jawa Timur yaitu Bojonegoro, Kediri, Pasuruan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang.

Sebelum berlakunya Pergub Nomor 49 Tahun 2018, UPT Dinas berjumlah 10 (sepuluh) unit terdiri dari 9 (sembilan) UPT Kewilayahan dan 1 (satu) UPT Peralatan. Sehubungan dengan rasionalisasi Jumlah UPT Provinsi sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dilakukan penggabungan dan penghapusan UPT sebagaimana disajikan pada **Tabel 1.1**.



Tabel 1.1 Matriks Perubahan Kelembagaan dan Wilayah Kerja UPT

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
1	UPT PSDA di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik	UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik
2	UPT PSDA di Madiun	Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Magetan		Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Magetan
3	UPT PSDA di Kediri	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang	UPT PSDA WS Brantas di Kediri	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang
4	UPT PSDA di Malang	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung	<b>Dihapus</b> (menjadi kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap)	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung
5	UPT PSDA di Surabaya	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo	<b>Dihapus</b> (menjadi kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap)	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo
6	UPT PSDA di Pamekasan	Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep	UPT PSDA WS Madura - Bawean	Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep
NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
7	UPT PSDA di Pasuruan	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo	UPT PSDA WS Welang Pekalen	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo, Kec Lawang
8	UPT PSDA di Lumajang	Kab Lumajang, Kab Jember	UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Kab Lumajang, Kab Jember, Kab Banyuwangi (Sebagian) Kab. Malang (Sebagian)
9	UPT PSDA di Bondowoso	Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Banyuwangi	UPT PSDA WS Sampean Setail	Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Banyuwangi
10	UPT Depo Peralatan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh Wilayah Provinsi	<b>Dihapus</b> (dilaksanakan oleh PPK Depo Peralatan yang dijabat oleh Es IV di Bidang Sungai Waduk Pantai)	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh Wilayah Provinsi



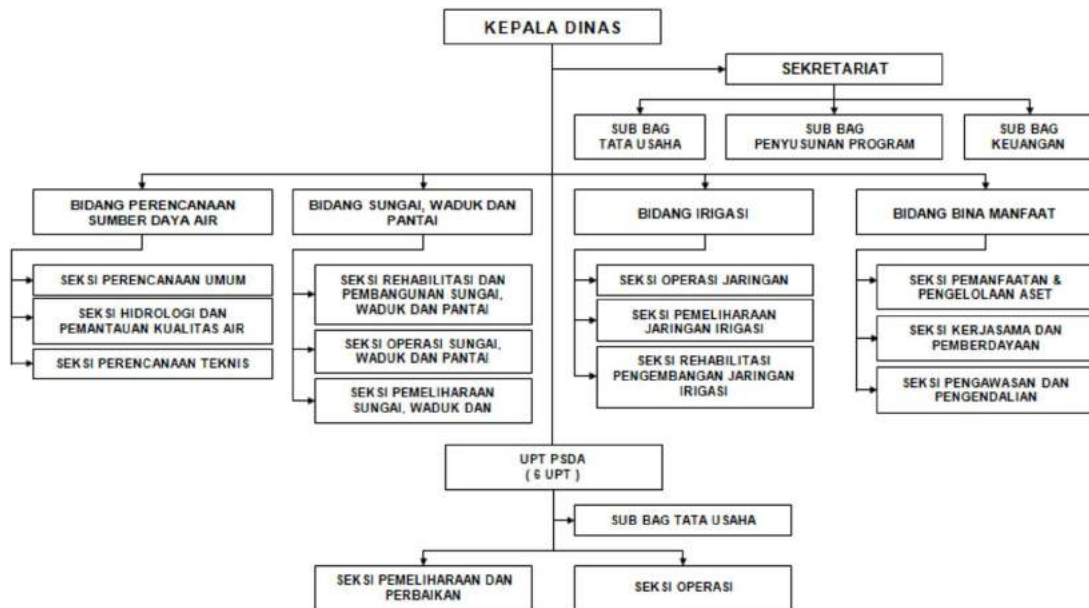
Salah satu hal yang mendasari perubahan UPT ini adalah adanya pemahaman, dari *Assessor* pada saat itu, mengenai beban kerja UPT Dinas di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan 7 (Tujuh) Wilayah Sungai yang terdiri dari 2 (dua) Wilayah Sungai Kewenangan Pusat dan 5 (lima) Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi. Sedangkan Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota tidak ada di Provinsi Jawa Timur.

Wilayah Sungai dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai Kesatuan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau – pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup>. Sedangkan Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak – anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Beban Kerja UPT yang berkedudukan di Wilayah Sungai Pusat, ditetapkan pada saat itu, merupakan kegiatan operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan menganggap kegiatan lingkup Sumber Daya Air lain yang bersifat kewilayahan bukan menjadi tanggung jawab Provinsi karena merupakan Kewenangan Pusat. Hal tersebut berdampak pada penggabungan UPT Dinas yang berkedudukan di Wilayah Sungai Pusat hanya menjadi 1 (satu) UPT (**Tabel 1.1**).

Kegiatan Lingkup Sumber Daya Air yang bersifat kewilayahan dan dianggap bukan menjadi tanggung jawab Provinsi antara lain : Survey dan Inventarisasi dalam rangka mitigasi bencana (Tanggul Kritis Sungai), Pengelolaan data hidrologi pada pos hujan di luar Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi, Kegiatan Tanggap Darurat sementara penanganan tanggul putus, pembangunan tampungan air kecil dan usaha konservasi mata air.

Susunan Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2016 :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air berdasarkan Pergub 61 Tahun 2016

## B. TUGAS DAN FUNGSI


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta menganalisa terhadap pengukuran kinerja.

Tugas Utama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pekerjaan Umum dan Tugas Pembantuan, yang diselenggarakan dengan melaksanakan fungsi :

- perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum;
- pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang – Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan adalah Hak Penguasaan Negara atas air, sumber – sumber air dan pengairan yang dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kemakmuran Rakyat dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Hak menguasai oleh Negara, yang dilaksanakan atas asas :

- 
- a. Kemanfaatan umum ;
  - b. Keterjangkauan ;
  - c. Keadilan ;
  - d. Keseimbangan ;
  - e. Kemandirian ;
  - f. Kearifan lokal
  - g. Wawasan lingkungan;
  - h. Kelestarian ;
  - i. Keberlanjutan;
  - j. Keterpaduan dan keserasian ;
  - k. Transparansi dan akuntabilitas.

Lingkup Kegiatan Sumber Daya Air adalah melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Teknis, Pembinaan, Pengusahaan, Eksploitasi dan Pemeliharaan, Perlindungan dan Pembiayaan.

### C. ISU STRATEGIS

Isu – Isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur untuk periode 2019 – 2024 Perubahan dirumuskan sebagai berikut :

- Menambah tampungan air baku di permukaan melalui revitalisasi tampungan yang sudah ada baik di sungai maupun waduk
- Meningkatkan resapan air di hulu DAS untuk mengurangi resiko bencana dan menambah simpanan air tanah
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengelola Sumber Daya Air sebagai upaya memperkuat rencana pembangunan berbasis Daerah Aliran Sungai
- Mendukung Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional dalam rangka Ketahanan Pangan
- Memantapkan ketahanan air dalam rangka mendukung sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

### D. CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading Kinerja juga merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.




LKjIP Dinas PU Sumber Daya Air Jatim Tahun 2021



## 2. CASCADING KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS 2

CASCADING SASARAN 2					
Ka PD	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa / Pembuang yang Diperbaiki				
	Persentase Kondisi Fisik Prasarana Irigasi dalam Kondisi Baik				
Es. 3	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik				
Es. 4					
Pelaksana	<b>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</b> Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup irigasi yang siap bangun	<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</b> Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS			<b>Rehabilitasi Bendung Irigasi</b> Jumlah Di yang dikelola kegiatan rehabilitasinya
		<b>Analisis Pengembangan Infrastruktur, IK</b> Jumlah Laporan Jumlah laporan analisa data Jumlah laporan rekomendasi hasil analisa			<b>Analisis Sumber Daya Air, IK</b> Jumlah kegiatan inventarisasi data pengawasan Jumlah Laporan Jumlah kegiatan pelaksanaan
		<b>Analisis Sumber Daya Air, IK</b> Jumlah laporan inventarisasi data pengawasan Jumlah Laporan Jumlah kegiatan pelaksanaan			<b>Analisis Sumber Daya Air, IK</b> Jumlah laporan inventarisasi data pengawasan Jumlah Laporan Jumlah kegiatan pelaksanaan
	<b>Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air, IK</b> Jumlah data Pelaporan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Jumlah data Bahan dan pelaporan Neraca Air Provinsi Jawa Timur Jumlah Bahan dan pelaporan Sumber Daya Air dalam Angka, pada saat perencanaan Umum, Bidang PSDA	<b>Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air, IK</b> Jumlah laporan pekerjaan pengairan Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengairan Jumlah laporan evaluasi pekerjaan pengawasan			<b>Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air, IK</b> Jumlah laporan pekerjaan pengairan Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengairan Jumlah laporan evaluasi pekerjaan pengawasan
		<b>Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air, IK</b> Jumlah laporan pekerjaan pengairan Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengairan Jumlah laporan evaluasi pekerjaan pengawasan			<b>Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air, IK</b> Jumlah laporan pekerjaan pengairan Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengairan Jumlah laporan evaluasi pekerjaan pengawasan
		<b>Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air, IK</b> Jumlah laporan pekerjaan pengairan Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengairan Jumlah laporan evaluasi pekerjaan pengawasan			<b>Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air, IK</b> Jumlah laporan pekerjaan pengairan Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengairan Jumlah laporan evaluasi pekerjaan pengawasan
	<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB	<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB			<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB
		<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB			<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB
		<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB			<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB
	<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB	<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB			<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB
		<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB			<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB
		<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB			<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Pengawasan, IK</b> Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung Jumlah laporan survey Jumlah dokumen RAB

### 3. CASCADING KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS 3

Ka PD	CASCADING SASARAN 3							
	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat							
Es- 3	Peningkatan tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi							
	Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
Es- 4	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi							
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi			
Pelaksana	Jumlah Di yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS	Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang dioperasikan UPT PSDA WS	Jumlah bintek untuk pelugas irigasi yang dilaksanakan	Jumlah unit kerja yang dilaksanakan pembinaan OP irigasinya	Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS	Jumlah alat ukur yang dipelihara UPT PSDA WS	Jumlah Di yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS	Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Analisis Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Analisis Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Analisis Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Pengawas Pengairan, IK</b>
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	Jumlah inventarisasi data pengawasan pengairan	Jumlah kegiatan inventarisasi data	Jumlah kegiatan inventarisasi data	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	Jumlah data inventarisasi pengawasan pengairan
	Jumlah kegiatan pemantauan jaringan irigasi	Jumlah kegiatan konsultasi permasalahan pekerjaan pengawasan	Jumlah laporan analisa data	Jumlah laporan analisa data	Jumlah data operasi dan pemeliharaan	Jumlah data operasi dan pemeliharaan	Jumlah data operasi dan pemeliharaan	Jumlah kegiatan konsultasi permasalahan pekerjaan pengawasan
	Jumlah laporan rekomendasi hasil pengamatan jaringan irigasi	Jumlah Laporan	Jumlah bahan kegiatan	Jumlah bahan kegiatan	Jumlah kegiatan pemantauan jaringan irigasi	Jumlah kegiatan pemantauan jaringan irigasi	Jumlah kegiatan pemantauan jaringan irigasi	Jumlah Laporan
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Pengawas Pengairan, IK</b>	<b>Pengawas Pengairan, IK</b>	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>	<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan, IK</b>
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi	Jumlah inventarisasi data pengawasan pengairan	Jumlah laporan analisa data	Jumlah laporan analisa data	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi	Jumlah laporan koordinasi dengan pihak terkait
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan	Jumlah laporan pekerjaan pengairan	Jumlah laporan rekomendasi hasil analisa	Jumlah laporan rekomendasi hasil analisa	Jumlah laporan pengawasan dan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu air serta jaringan irigasi (tiap sepuluh hari)	Jumlah laporan pengawasan dan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu air serta jaringan irigasi (tiap sepuluh hari)	Jumlah laporan pengawasan dan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu air serta jaringan irigasi (tiap sepuluh hari)	Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung
	Jumlah laporan pengawasan dan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu air serta jaringan irigasi (tiap sepuluh hari)	Jumlah kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengairan	Jumlah inventarisasi data	Jumlah inventarisasi data	Jumlah laporan ke UPT PSDA mengenai data debit air, curah hujan dan tanaman (bulanan dan triwulan) di wilayah kerja UPT PSDA	Jumlah laporan ke UPT PSDA mengenai data debit air, curah hujan dan tanaman (bulanan dan triwulan) di wilayah kerja UPT PSDA	Jumlah laporan ke UPT PSDA mengenai data debit air, curah hujan dan tanaman (bulanan dan triwulan) di wilayah kerja UPT PSDA	Jumlah laporan survey
		<b>Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan, IK</b>						
		Jumlah laporan koordinasi dengan pihak terkait						
	Jumlah dokumen inventarisasi kondisi dan fungsi jaringan irigasi, sungai, waduk dan embung							
	Jumlah laporan hasil pelaksanaan survey lapangan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan							
	Jumlah data operasi dan pemeliharaan							
	<b>Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah laporan berkala kepada UPT PSDA mengenai kondisi pintu air dan jaringan irigasi							
	Jumlah kegiatan kontrol kondisi jaringan irigasi dan bangunan pengairan							
	<b>Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi, IK</b>							
	Jumlah data RAB pada kegiatan di UPT PSDA WS							
	Jumlah dokumen bahan penyusunan buku ANNOR UPT PSDA WS							
	<b>Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, IK</b>							
	Jumlah inventarisasi data operasi dan pemeliharaan	</						

LKjIP Dinas PU Sumber Daya Air Jatim Tahun 2021

LKjIP Dinas PU Sumber Daya Air Jatim Tahun 2021

## **E. PETA PROSES BISNIS**

Business Proses Mapping atau Peta Proses Bisnis merupakan langkah awal bagi suatu organisasi atau lembaga dalam melakukan penataan tatalaksana di lingkungannya. Business Proses Mapping dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan proses-proses yang ada di suatu organisasi atau lembaga. Pemetaan proses adalah visualisasi dari rangkaian seluruh aktivitas dari suatu organisasi, yang mendemonstrasikan bagaimana pekerjaan di dalam organisasi tersebut dilakukan, sehingga menjadikan pekerjaan tergambar dengan jelas/eksplisit.

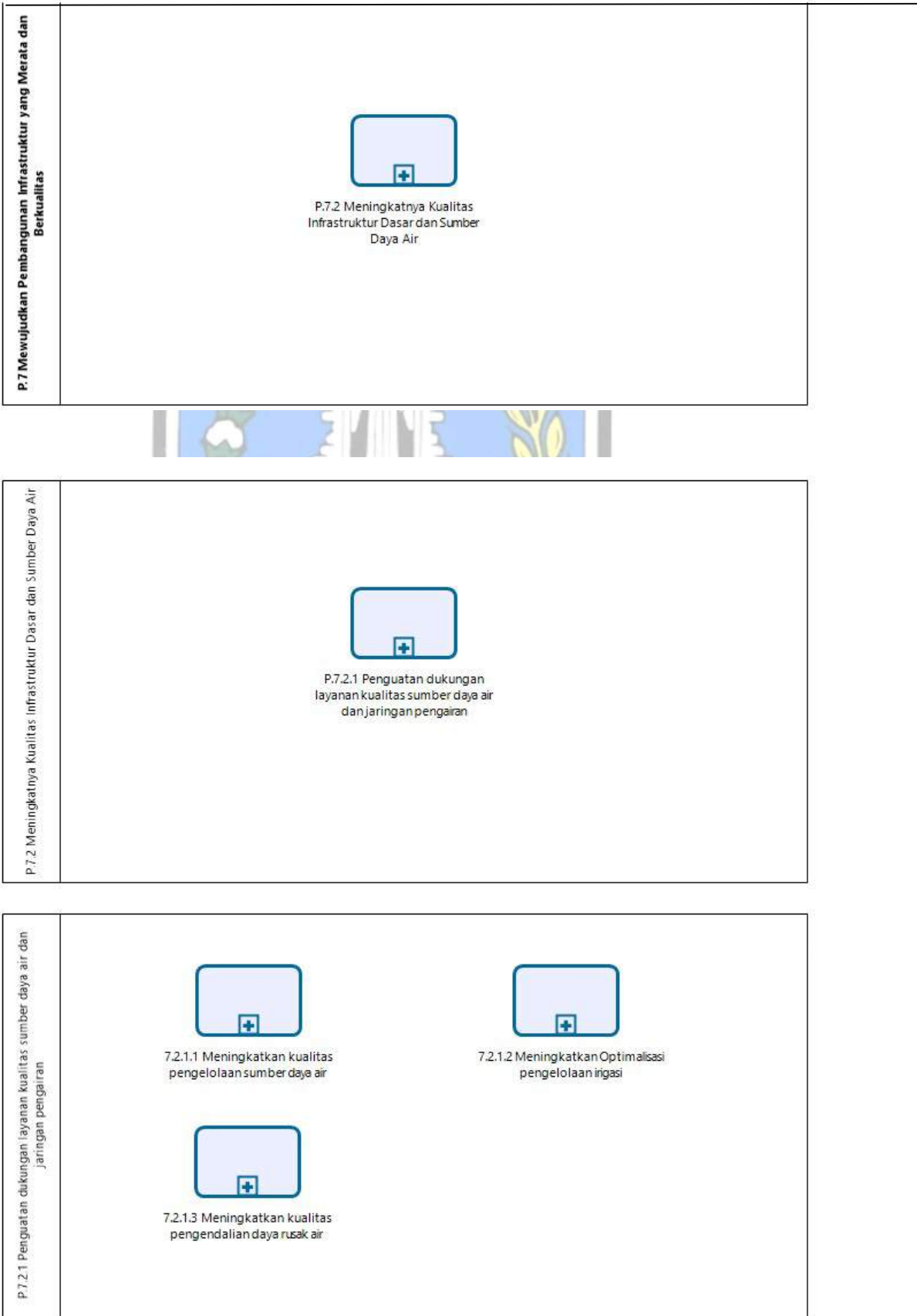
Business Proses Mapping atau sering dikenal dengan pemetaan proses bisnis bertujuan untuk menata seluruh proses (tatalaksana) yang ada di sebuah organisasi atau lembaga sehingga memberikan dasar yang jelas bagi penyusunan SOP, agar organisasi atau lembaga bekerja dengan standar yang jelas, efektif, efisien, produktif, dan akuntabel.









Manfaat dari peta proses bisnis bagi organisasi atau lembaga yaitu dalam :

1. Pembuatan atau perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan.
2. Perbaikan struktur organisasi.
3. Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job descriptions).


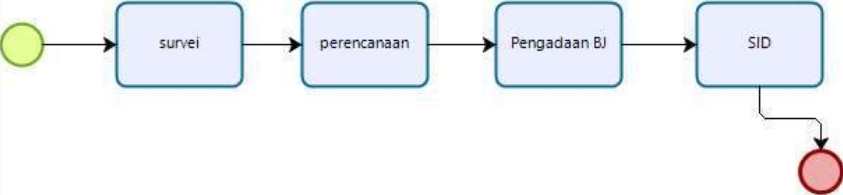
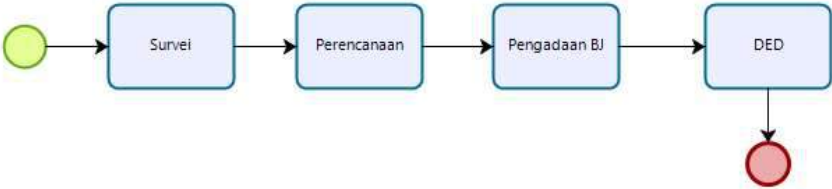
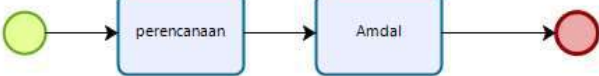
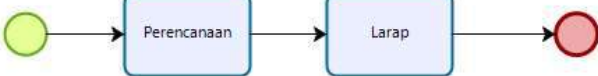


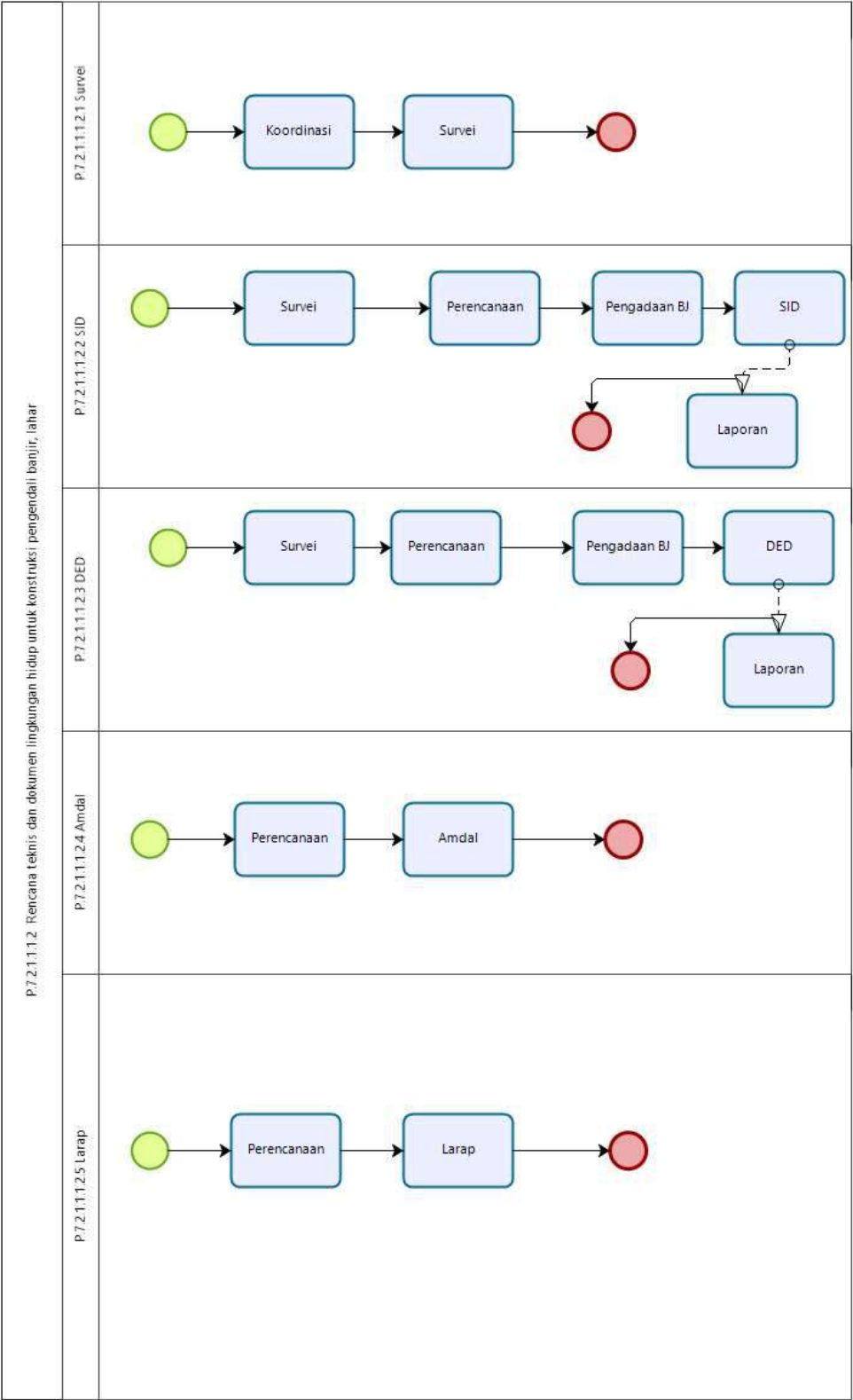
PETA PROSES BISNIS DINAS PU SUMBER DAYA AIR

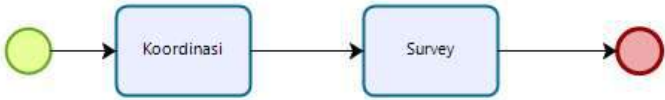

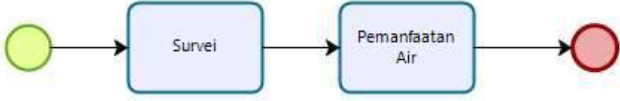


7.2.1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air	<div> <div>  </div> <div>7.2.1.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan sumber daya air</div> </div> <div> <div>  </div> <div>7.2.1.1.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air</div> </div> <div> <div>  </div> <div>7.2.1.1.2 Meningkatkan pengelolaan hidrologi sistem informasi dan kualitas air</div> </div> <div> <div>  </div> <div>7.2.1.1.4 Meningkatkan kualitas pengendalian lahan dan aset sumber daya air</div> </div>
7.2.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan sumber daya air	<div> <div>  </div> <div>P.7.2.1.1.1.1 Rencana Teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi Bendungan, embung dan ban</div> </div> <div> <div>  </div> <div>P.7.2.1.1.1.2 Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar,</div> </div> <div> <div>  </div> <div>P.7.2.1.1.1.3 evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan SDA WS kewenangan provinsi</div> </div> <div> <div>  </div> <div>P.7.2.1.1.1.4 penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kew. Prov</div> </div>



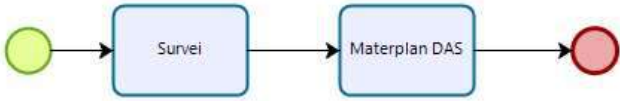
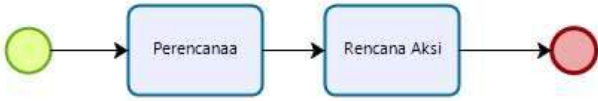


P7.2.1.1.1 Rencana Teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi: Bendungan, embung dan tan	P7.2.1.1.1.1 Survei	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Koordinasi[Koordinasi]     Koordinasi --&gt; Survei[Survei]     Survei --&gt; Laporan[Laporan]     Laporan --&gt; End(( ))           </pre>
	P7.2.1.1.1.2 SID	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; survei[survei]     survei --&gt; perencanaan[perencanaan]     perencanaan --&gt; PengadaanBJ[Pengadaan BJ]     PengadaanBJ --&gt; SID[SID]     SID --&gt; End(( ))           </pre>
	P7.2.1.1.1.3 DED	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Survei[Survei]     Survei --&gt; Perencanaan[Perencanaan]     Perencanaan --&gt; PengadaanBJ[Pengadaan BJ]     PengadaanBJ --&gt; DED[DED]     DED --&gt; End(( ))           </pre>
	P7.2.1.1.1.4 AMDAL	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; perencanaan[perencanaan]     perencanaan --&gt; Amdal[Amdal]     Amdal --&gt; End(( ))           </pre>
	P7.2.1.1.1.5 LARAP	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Perencanaan[Perencanaan]     Perencanaan --&gt; Larap[Larap]     Larap --&gt; End(( ))           </pre>

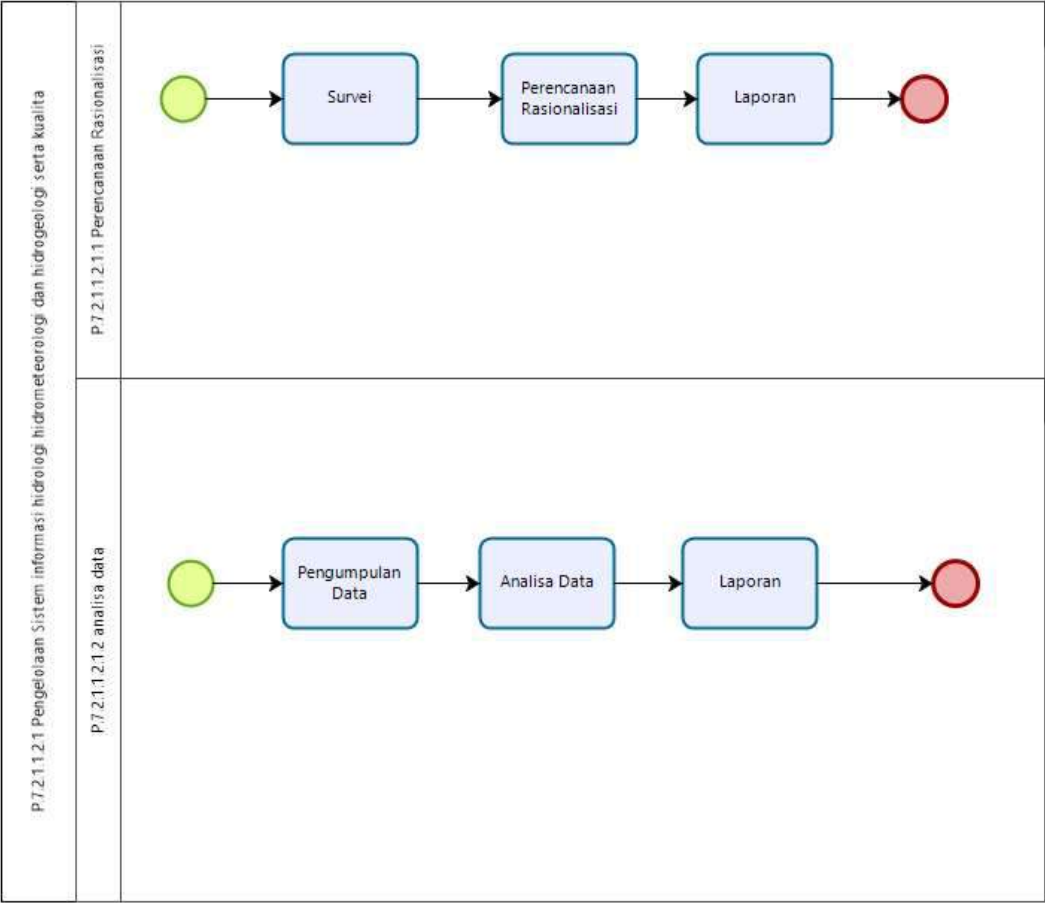


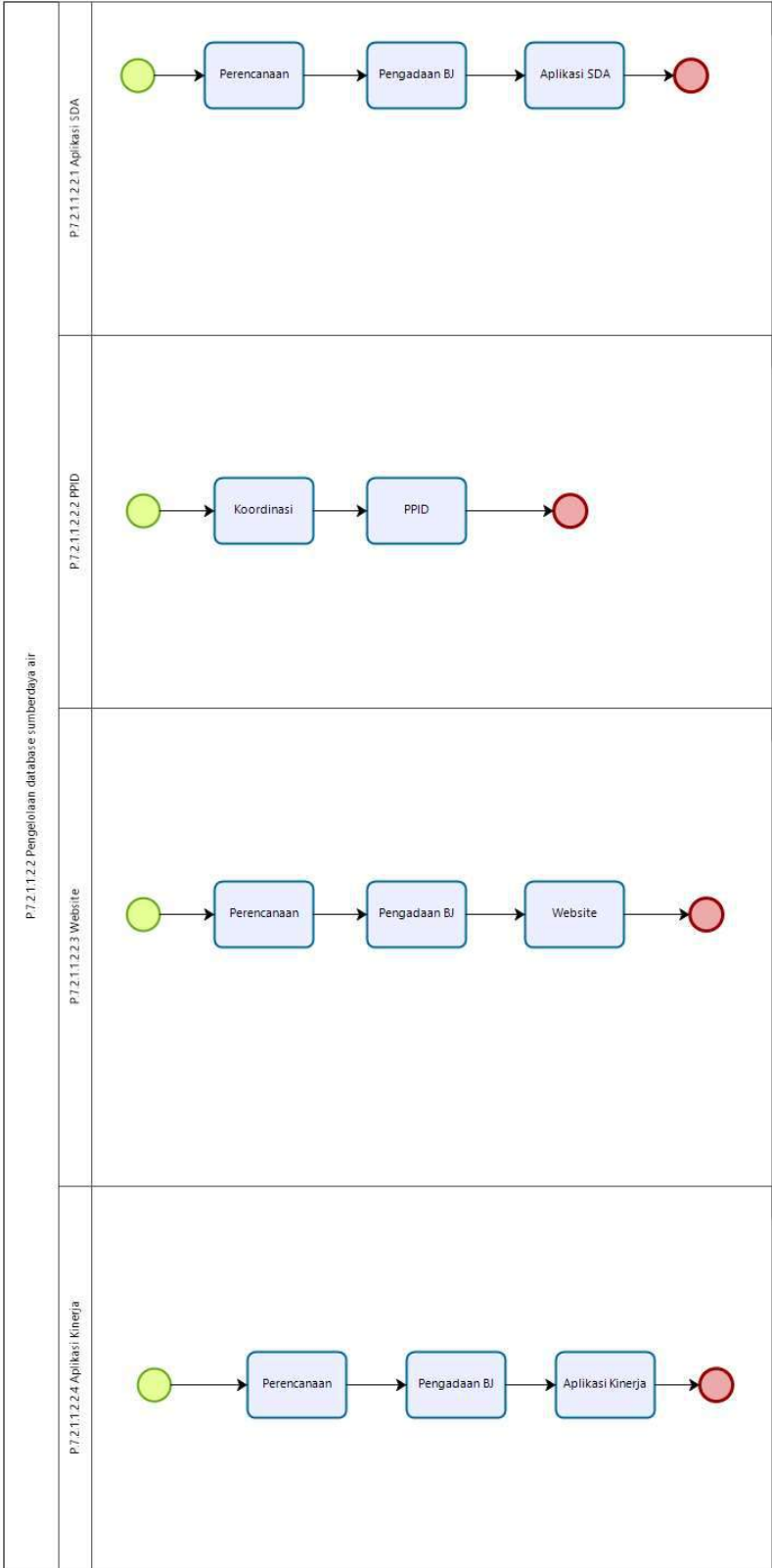
P.7.2.1.1.3 Evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan SDA WS kewenangan provinsi	P.7.2.1.1.3.1 Survey	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Koordinasi[Koordinasi]     Koordinasi --&gt; Survey[Survey]     Survey --&gt; End(( ))           </pre>
	P.7.2.1.1.3.2 Rekomtek Alokasi	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Koordinasi[Koordinasi]     Koordinasi --&gt; Survei[Survei]     Survei --&gt; Rekomtek[Rekomtek alokasi]     Rekomtek --&gt; End(( ))           </pre>
	P.7.2.1.1.3.3 Pemanfaatan Air	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Survei[Survei]     Survei --&gt; Pemanfaatan[Pemanfaatan Air]     Pemanfaatan --&gt; End(( ))           </pre>






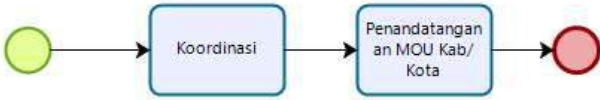
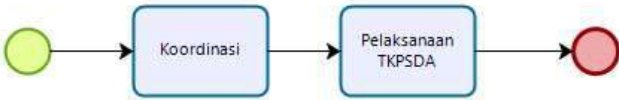
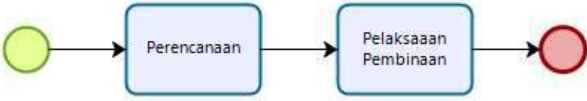
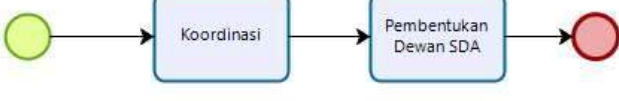
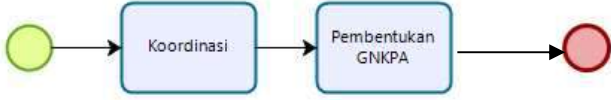
P.7.2.1.1.4 penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kew. Prov	P.7.2.1.1.4.1 Masterplan DAS	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Survei[Survei]     Survei --&gt; Materplan[Materplan DAS]     Materplan --&gt; End(( ))           </pre>
	P.7.2.1.1.4.2 Rencana Aksi	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Perencanaa[Perencanaa]     Perencanaa --&gt; Rencana[Rencana Aksi]     Rencana --&gt; End(( ))           </pre>
P.7.2.1.1.2 Meningkatkan pengelolaan hidrologi,sistem informasi dan kualitas air	<div>  <div> P.7.2.1.1.2.1 Pengelolaan Sistem informasi hidrologi hidrometeorologi dan hidrogeologi serta kualita </div> </div> <div>  <div> P.7.2.1.1.2.2 Pengelolaan database sumberdaya air </div> </div>	





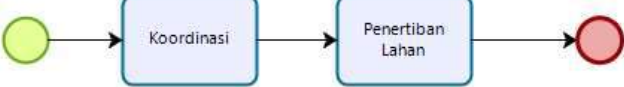
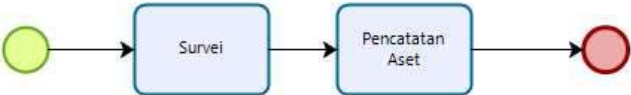






P.7.2.1.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	<div>  </div> <div> P.7.2.1.1.3.1 koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA </div>
--	---



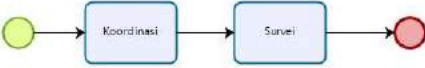
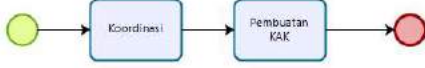
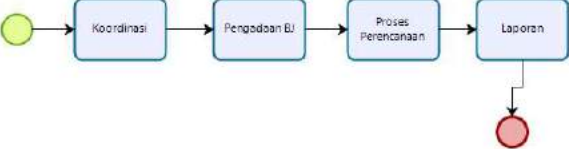
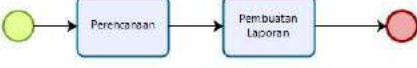
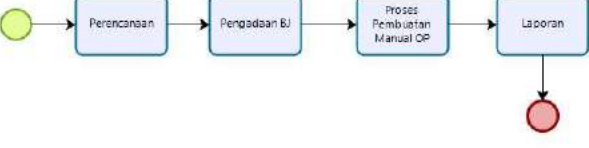
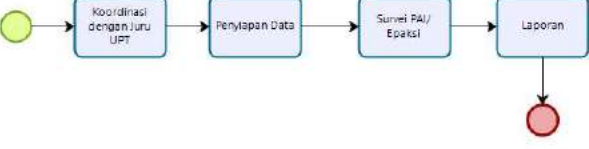
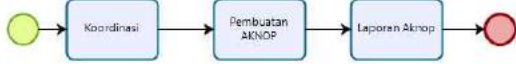

P.7.2.1.1.3.1 koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA	P.7.2.1.1.3.1.1 Koordinasi	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Koordinasi[Koordinasi]     Koordinasi --&gt; End(( ))           </pre>
	P.7.2.1.1.3.1.2 Mou Kab/Kota	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Koordinasi[Koordinasi]     Koordinasi --&gt; Penandatanganan[Penandatanganan MOU Kab/Kota]     Penandatanganan --&gt; End(( ))           </pre>
	P.7.2.1.1.3.1.3 TKPSDA	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Koordinasi[Koordinasi]     Koordinasi --&gt; Pelaksanaan[Pelaksanaan TKPSDA]     Pelaksanaan --&gt; End(( ))           </pre>
	P.7.2.1.1.3.1.4 Pembinaan KMPS	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Perencanaan[Perencanaan]     Perencanaan --&gt; Pelaksanaan[Pelaksanaan Pembinaan]     Pelaksanaan --&gt; End(( ))           </pre>
	P.7.2.1.1.3.1.5 Dewan SDA	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Koordinasi[Koordinasi]     Koordinasi --&gt; Pembentukan[Pembentukan Dewan SDA]     Pembentukan --&gt; End(( ))           </pre>
	P.7.2.1.1.3.1.6 GNKPA	 <pre> graph LR     Start(( )) --&gt; Koordinasi[Koordinasi]     Koordinasi --&gt; Pembentukan[Pembentukan GNKPA]     Pembentukan --&gt; End(( ))           </pre>



P.7.2.1.1.4 Meningkatkan kualitas pengendalian lahan dan aset sumber daya air	<div>  <p>P.7.2.1.1.4.1 koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan aset dan lahan sumberdaya air</p> </div>	
P.7.2.1.1.4.1 koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan aset dan lahan sumberdaya air	P.7.2.1.1.4.1.1 Rekomtek Perijinan	<div>  </div>
	P.7.2.1.1.4.1.2 Penertiban Lahan	<div>  </div>
	P.7.2.1.1.4.1.3 Pencatatan Aset	<div>  </div>

P.7.2.1.2 Meningkatkan Optimalisasi pengelolaan irigasi	<div>  <p>P.7.2.1.2.1 Meningkatkan persentase kondisi fisik prasarana irigasi</p> </div> <div>  <p>P.7.2.1.2.2 Meningkatkan kualitas operasional jaringan sumber daya air</p> </div>
P.7.2.1.2.1 Meningkatkan persentase kondisi fisik prasarana irigasi	<div>  <p>P.7.2.1.2.1.1 Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan</p> </div> <div>  <p>P.7.2.1.2.1.2 Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dan Bangunan Utama</p> </div>



P7.2.12.1 Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi inggris dan ra	P7.2.12.1.1 Survei	
	P7.2.12.1.2 KAK	
	P7.2.12.1.3 Perencanaan	
	P7.2.12.1.4 Laporan	
	P7.2.12.1.5 Manual OP	
	P7.2.12.1.6 PAU/ Epaksi	
	P7.2.12.1.7 AKNOP	
	P7.2.12.1.8 BCP	

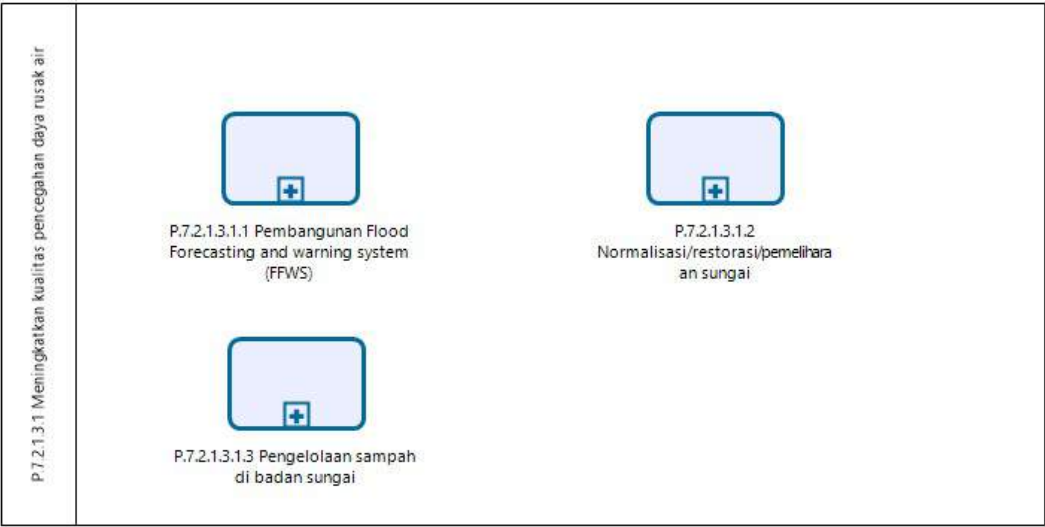
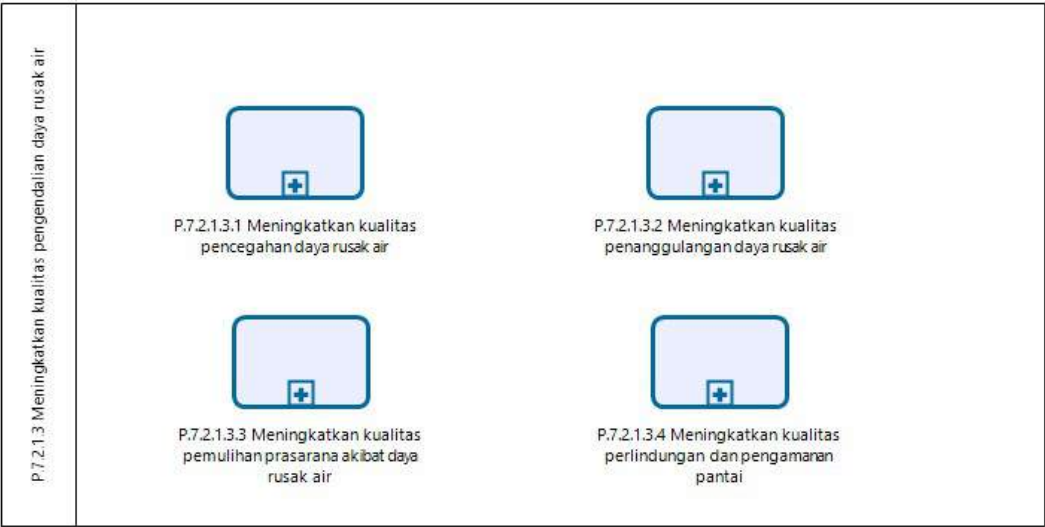
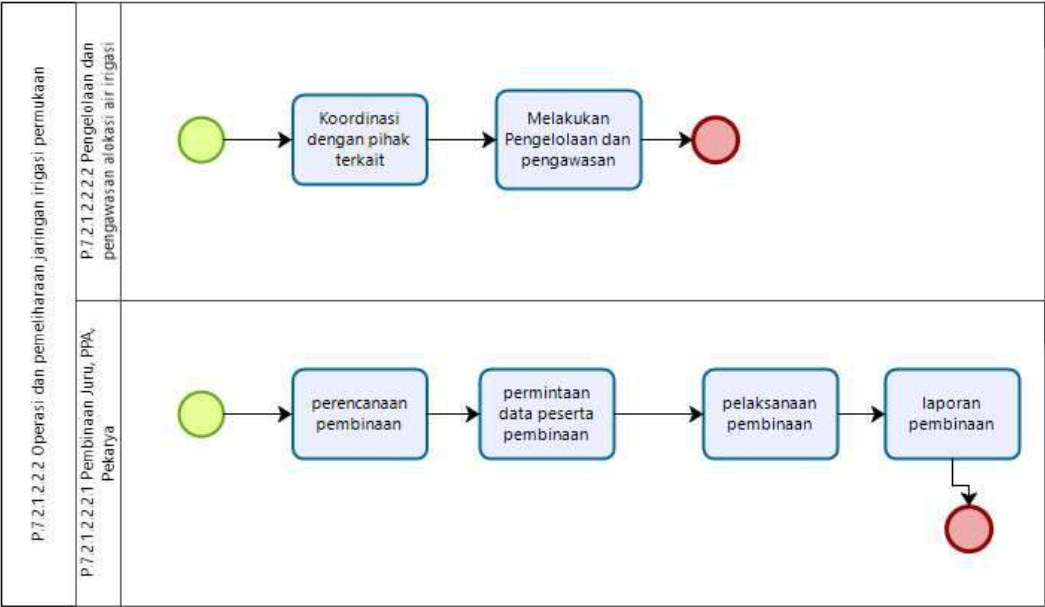


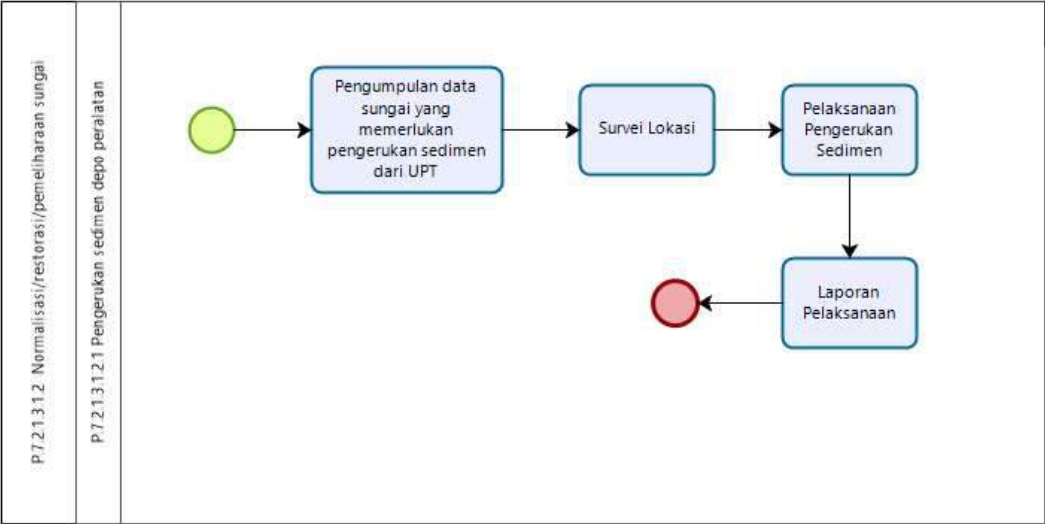
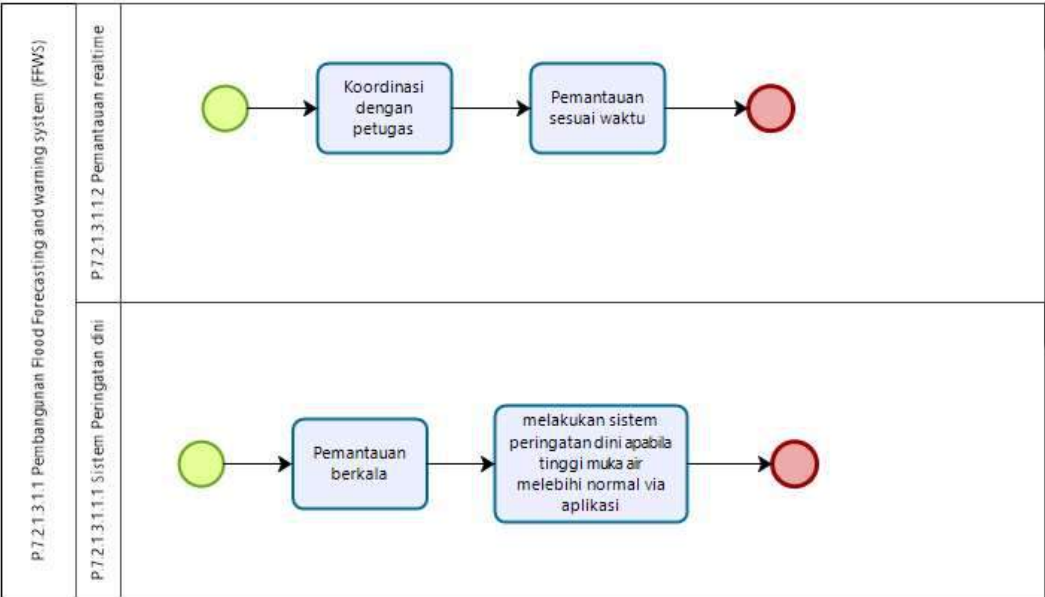
<div>P.7.2.1.2.2 Meningkatkan kualitas operasional jaringan sumber daya air</div>	<div> <div>  <div> <div>P.7.2.1.2.2.1 pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan provinsi</div> </div> </div> <div> <div>  <div> <div>P.7.2.1.2.2.2 operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan</div> </div> </div> </div> </div>
---	---

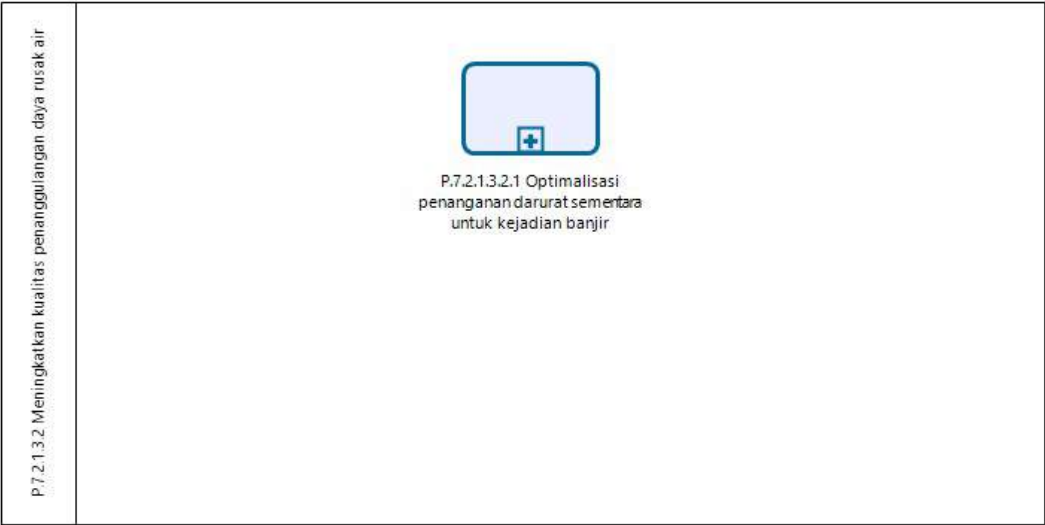
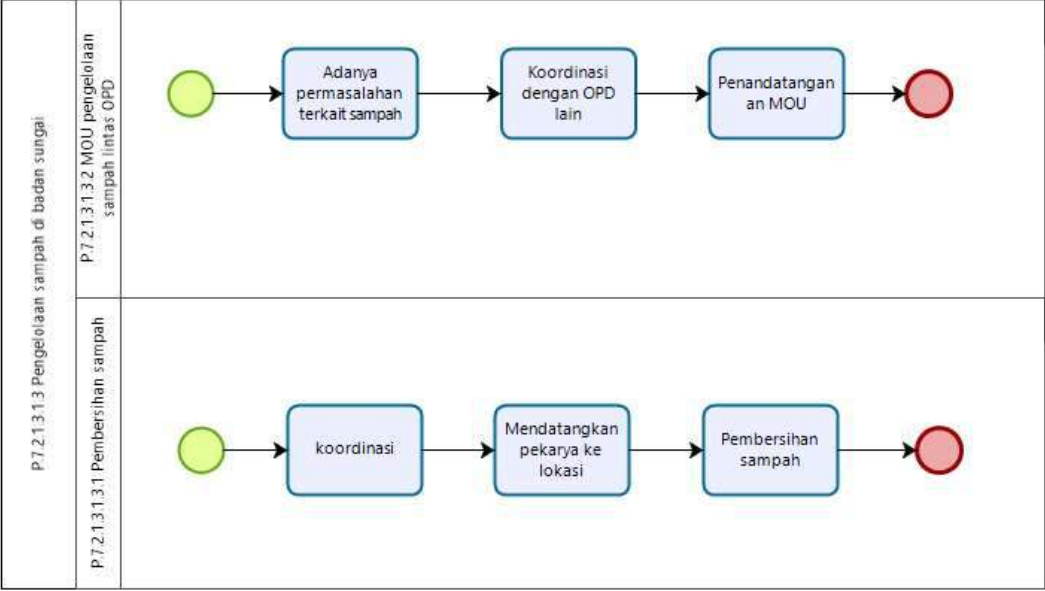


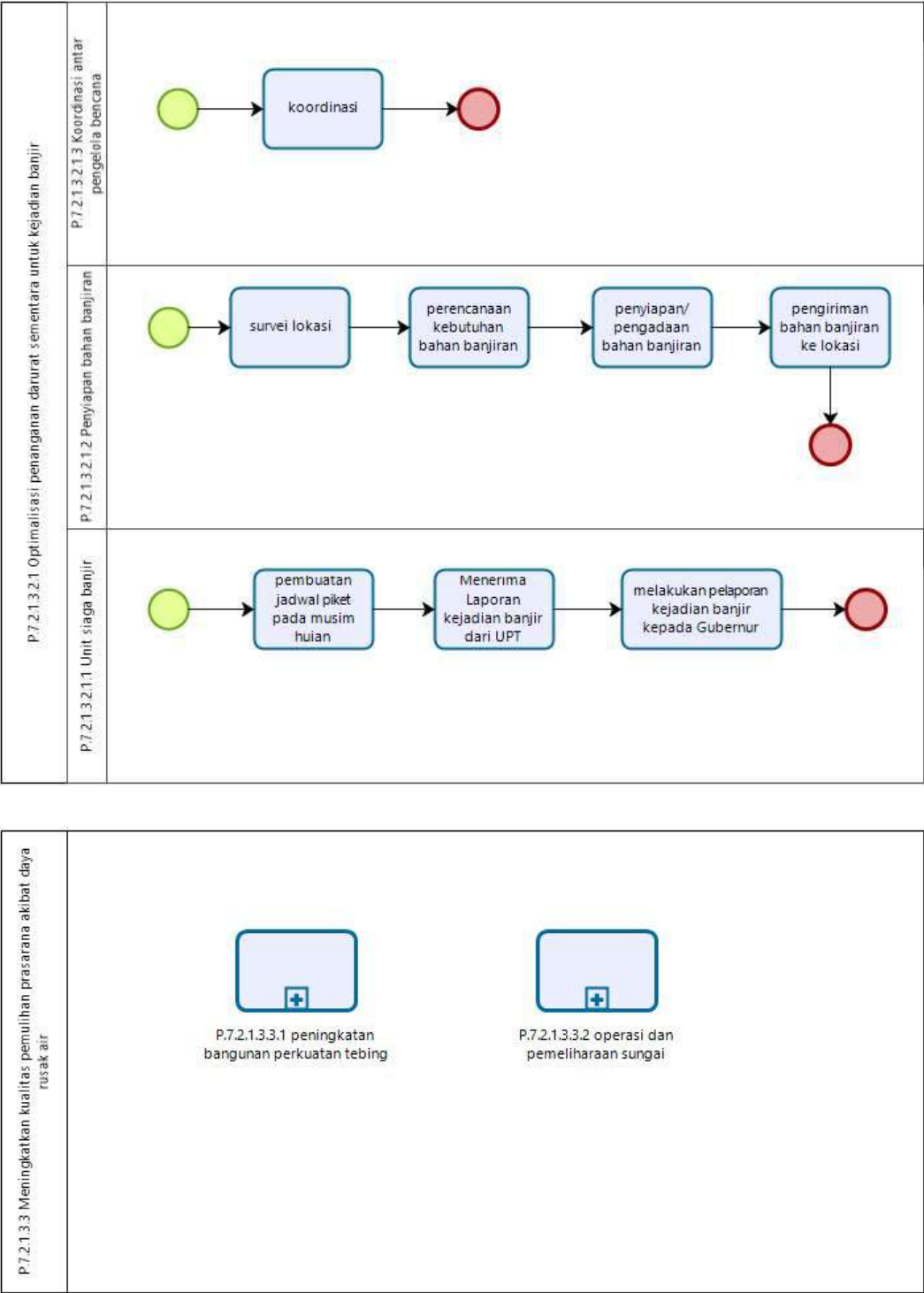




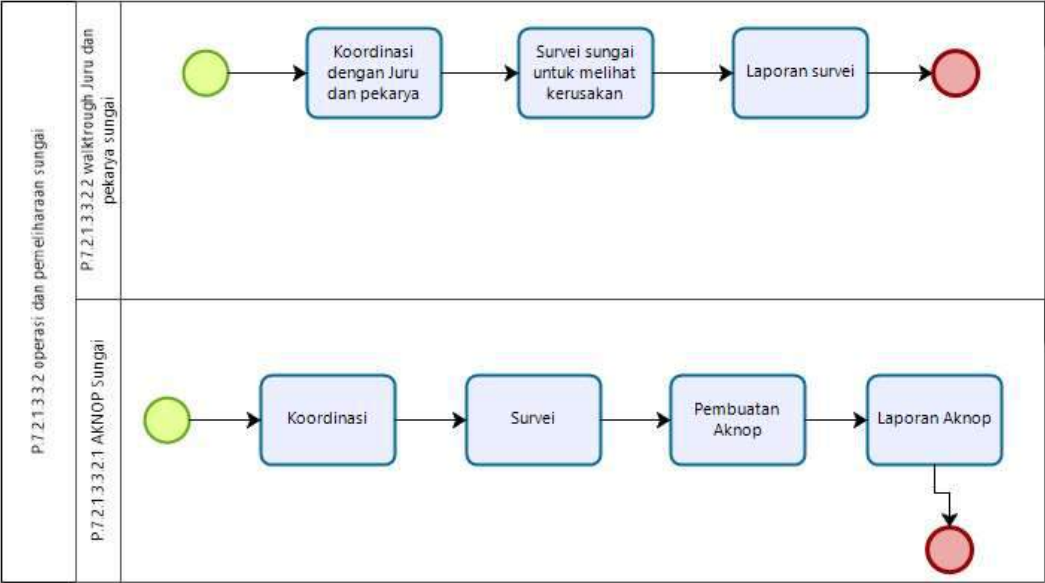
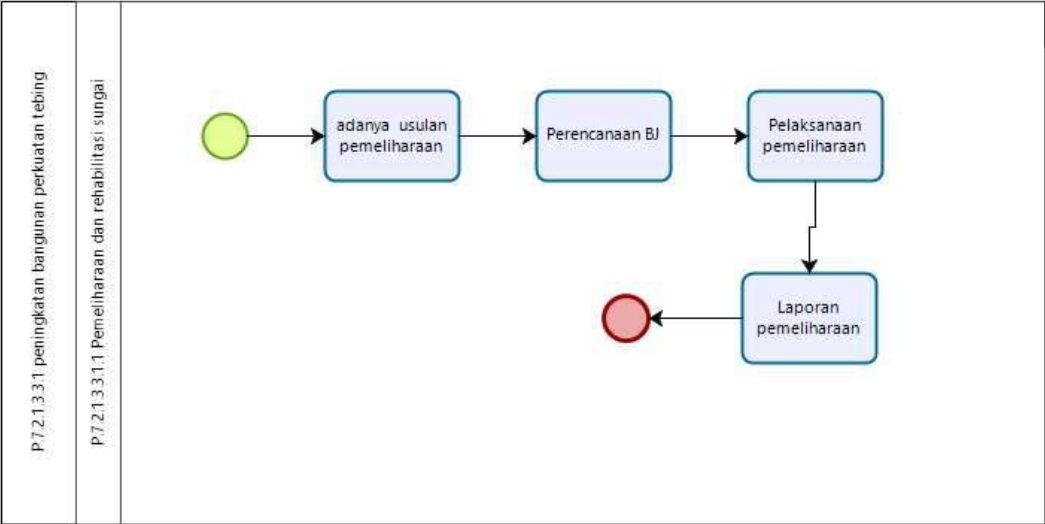


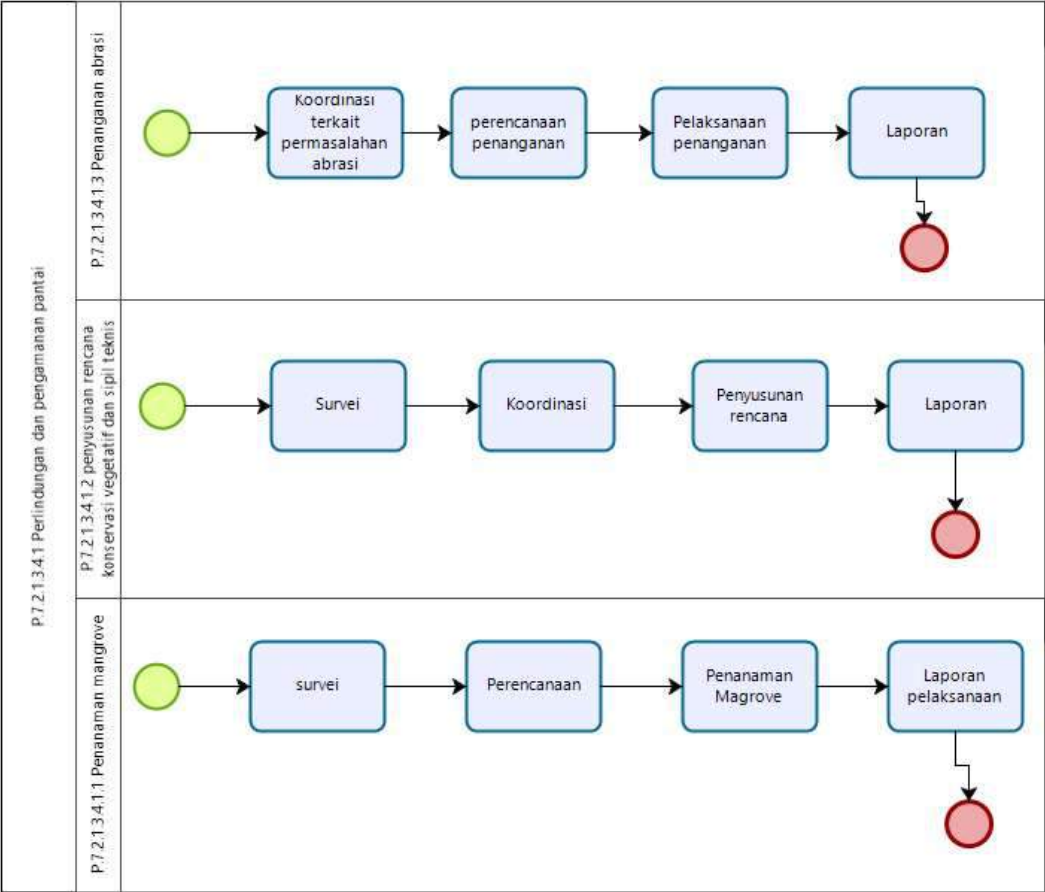












## **F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2021**

Hasil evaluasi implementasi SAKIP menunjukkan bahwa Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 84,47 atau predikat A dengan interpretasi Memuaskan. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang memuaskan.

Uraian selengkapnya secara singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

- 1) Secara umum Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
- 2) Implementasi SAKIP Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur belum mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, sehingga diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan;
- 3) Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja keseluruhan ASN di semua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketercukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya kinerja;
- 4) Implementasi Akuntabilitas kinerja sebagai salah satu budaya kinerja masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara merata pada instansi;
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja internal secara berkala belum sepenuhnya dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan baik.



**LKjIP 2021**

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGI TAHUN 2019-2024

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra PD disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### 2.1.1 Tujuan

Sebagai penjabaran dan implementasi atas pernyataan misi, keberhasilan perumusan tujuan sangat dipengaruhi beberapa kriteria diantaranya akseptabilitas, fleksibilitas, dapat diukur, motivator, kesesuaian dengan rumusan visi dan misi organisasi dan mudah dipahami.



**Tujuan** yang telah ditetapkan adalah :

" Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah “.

Sumber Daya Air perlu diatur untuk tujuan :

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air;
- f. Mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

**Tabel : 2.1      Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	
Mewujudkan keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah	1	Indeks Ketahanan Air
		2	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik
		3	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi
		4	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir

2.1.2      Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2019-2024), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada , yaitu :

**Sasaran 9** : “ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air “.

**Tabel : 2.2      Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN		SASARAN			
Uraian	Indikator	Uraian		Indikator	
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah	Indeks Ketahanan Air	1	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	
	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	2	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa / Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi				
	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	3	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	
		4	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	

**2.1.3      Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah suatu usaha untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi juga memperhatikan bagaimana organisasi meningkatkan kinerjanya, dan bagaimana mencapai misinya. Strategi yang telah ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan dengan cara memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air;
- b. Mengendalikan daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara:
  - Menyediakan sarana dan prasarana pengendali banjir;
  - Memenuhi kebutuhan air untuk irigasi, domestik, industri dan kebutuhan air lainnya.

**Arah Kebijakan yang telah ditetapkan adalah :**

- a. Pengendalian Penerbitan Rekomendasi Teknik Sumber Daya Air
- b. Pengendalian dan Pengawasan Aset Sumber Daya Air
- c. Pembuatan Mini Lab Kualitas Air untuk assesmen cepat
- d. Relokasi pos hujan berbasis hasil rasionalisasi hidrologi
- e. Pemantauan pos hujan dan duga air yang mendukung flood early warning system dan pengumpulan data
- f. Peningkatan kualitas data dan peningkatan kemampuan analisa alokasi air
- g. Publikasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan aksesibilitas data SDA
- h. Kaji ulang DED sungai dan Irigasi
- i. Penguatan kordinasi antar lembaga pengelola
- j. Pembuatan Konstruksi Penahan Air di Hulu (Diatas Orde 3) dan Penanaman Pohon

- k. Rehabilitasi Bangunan Utama, Pengurangan kebocoran di Saluran Primer dan Sekunder, Perbaikan Pintu air dan Pembuang
- l. Pengerukan Rutin Saluran Primer dan Sekunder
- m. Pemenuhan kebutuhan tenaga Juru Pengairan Provinsi di DI Provinsi
- n. Pengelolaan Irigasi partisipatif melibatkan P3A
- o. Pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten
- p. Percepatan pengesahan Perda Irigasi
- q. Pemenuhan anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Irigasi (AKNOP) minimal 50% dengan trend penambahan 5% per tahun
- r. Perkuatan Institusi OP Irigasi
- s. Penyediaan data OP yang sah (valid) dan akurat
- t. Inisiasi Modernisasi Irigasi
- u. Revitalisasi waduk, sungai, embung, ranu kewenangan provinsi
- v. Penertiban sempadan, Sertifikasi asset dan Pemasangan Patok Batas
- w. Penentuan 30 Sungai prioritas di WS Kewenangan Provinsi, Perbaikan tanggul dan pembuatan parapet, dan Parapet Bio Engineering
- x. Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Koordinasi antar Lembaga
- y. Perkuatan database sungai dan sistem pelaporan banjir
- z. Respon Tanggap Darurat maksimum 18 jam setelah Laporan Masuk
- aa. Pembentukan Satuan Pemantau Banjir
- bb. Pengadaan Stock Bahan Banjiran Rp 1 M/UPT/Tahun
- cc. Peremajaan alat berat dan pengadaan alat/bahan tanggap darurat banjir

- dd. Pengoperasian Ruang Kendali Sungai
- ee. Publikasi Data Sungai rawan banjir
- ff. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Perencanaan, Pemantauan dan pengendalian program/Kegiatan
- gg. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi laporan keuangan dan Verifikasi dokumen pertanggungjawaban
- hh. Peningkatan kapasitas pegawai dan Penyusunan program pembinaan pegawai baik teknis maupun administratif

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :



<b>Tabel : 2.3</b>	<b>Rencana Kinerja Tahun 2021</b>
--------------------	-----------------------------------

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		TARGET
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis di Bidang Sumber Daya Air	1	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	1	Indeks Ketahanan Air	2,92 %
	2	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	2	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,85 %
	3	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	3	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	82,90 %
	4	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	4	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,57 %
	5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5	Nilai implementasi evaluasi SAKIP perangkat daerag	84,26

Penetapan Kinerja Tahun 2021 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.



**LKjIP 2021**

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur:

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,92 %	2,95 %	101,03
2	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,85 %	68,86 %	100,01
3	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	82,90 %	85,19 %	102,76
4	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,57 %	5,70 %	102,33
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,16	84,47	100,37

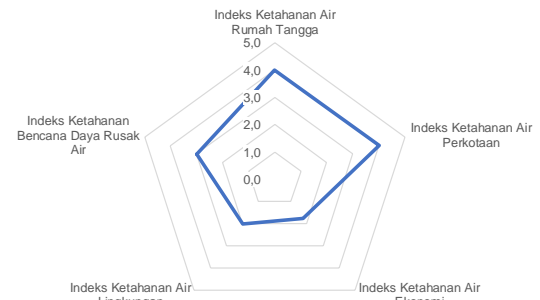
Sumber data : 1. Target (dari Renstra 2019-2024)

2. Realisasi (Laporan Hasil Evaluasi SAKIP th. 2021, Laporan Pembangunan Tampung Air, Laporan Realisasi Tanam, Laporan Realisasi Alokasi Air, Laporan Kinerja Jaringan Irigasi, dan Laporan Penanganan Banjir)

Adapun Dasar Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. INDEKS KETAHANAN AIR

REKAPITULASI

1	Indeks Ketahanan Air Rumah Tangga	6					4												
			1.1	Cakupan Layanan Air Minum	94,39	%	5												
			1.2	Sanitasi Layak	78,78	%	3												
			1.3	Higienitas (Prevalensi Diare)		Kejadian													
2	Indeks Ketahanan Air Perkotaan	6; 11					4												
			2.1	Suplai Air Perkotaan (sama dengan data 1.1)	94,39	%	5												
			2.2	Penanganan Limbah	70,61	%	3												
3	Indeks Ketahanan Air Ekonomi						1,75												
	Item 3.1 sd 3.4 dibagi 4  Item 3.5 sd 3.6 skor masing - masing maks. 5		3.1	Kestabilan suplai air			1												
		3.1.1	Koefisien Variasi Hujan setahun	NA															
		3.1.2	Koefisien Variasi Hujan antar tahun	0,148		2													
		3.1.3	Rasio Volume Tampungan dengan Volume Air Tersedia	2,37	%	1													
		3.2	Rasio pengambilan dan Ketersediaan (Water Stress)	42,53	%	4													
		3.3	Indeks Tampungan dan Durasi Kekeringan	NA	%	NA													
		3.4	Ketersediaan Data			1													
		3.4.1	Data Tampungan air	tersedia	1														
		3.4.2	Pengambilan air permukaan dan air tanah	tidak tersedia															
		3.4.3	Pengambilan air industri	tersedia	1														
		3.4.4	Produk Domestik Bruto Sektoral	tersedia	1														
		3.4.5	Tapak Air (Water Footprint)	tidak tersedia															
		3.4.6	Jumlah Pembangkit Listrik	tidak tersedia															
		3.4.7	Jumlah Pembangkit Listrik menurut Sumber	tersedia	1														
		3.4.8	Hujan Bulanan	tersedia	1														
		3.5	Ketahanan Air Pertanian			4,5													
		3.5.1	Produktivitas air pertanian	432,47	10*6 USD/km3	4													
		3.5.2	Swasembada Pangan	0,41		5													
		3.6	Produktivitas air untuk energi	NA	GWh/km3	NA													
		3.7	Produktivitas air untuk industri	NA	10*6 USD/km3	1													
4	Indeks Ketahanan Air Lingkungan	6					2												
			4.1	Kualitas Air Sungai	2		2												
			4.2	Indeks Kekritisan Air	NA														
5	Indeks Ketahanan Bencana Daya Rusak Air	6;11					3,00												
			5.1	Curah Hujan Rata - Rata maksimum Mingguan	NA	mm													
			5.2	Curah Hujan Harian >100 mm	NA	mm													
			5.3	Jumlah Hari Kering tanpa hujan	NA	hari													
			5.4	Kapasitas Tampungan per Wilayah Sungai	0,22	%	1												
			5.5	Persentase Luas Hutan dalam Wilayah Sungai	36,11	%	5												
SKOR KETAHANAN AIR							14,75												
INDEKS = RERATA 5 PARAMETER							2,95												
<div>Indeks Ketahanan Air Rumah Tangga4,00</div> <div>Indeks Ketahanan Air Perkotaan4,00</div> <div>Indeks Ketahanan Air Ekonomi1,75</div> <div>Indeks Ketahanan Air Lingkungan2,00</div> <div>Indeks Ketahanan Bencana Daya Rusak Air3,00</div> <div></div> <table><tr><th>Parameter</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Skor</td><td>14,75</td><td>14,75</td></tr><tr><td>Indeks Ketahanan Air</td><td>2,95</td><td>2,95</td></tr><tr><td>Status</td><td>Sedang</td><td>Sedang</td></tr></table>								Parameter	2020	2021	Skor	14,75	14,75	Indeks Ketahanan Air	2,95	2,95	Status	Sedang	Sedang
Parameter	2020	2021																	
Skor	14,75	14,75																	
Indeks Ketahanan Air	2,95	2,95																	
Status	Sedang	Sedang																	

## 2. PERSENTASE KETERSEDIAAN AIR IRIGASI DI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Persentase pelayanan air untuk irigasi

Kebutuhan air = 384.068 m3/det

Ketersediaan air = 327.181 m3/det

$$= \frac{Ketersediaan\ air}{Kebutuhan\ air} \times 100\%$$

$$= \frac{327.181}{384.068} \times 100\%$$

$$= 85,19 \%$$

## 3. KINERJA BANGUNAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2021

Tabel 3.2 Kinerja Bangunan Jaringan Irigasi

No.	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		capaian	%	capaian	%	capaian	%	capaian	%	capaian	%
1	Kondisi saluran baik (km)	1.210,00	69,48	1.147,99	65,70	1.152,50	62,43	1.139,01	61,70	1.143.832	60,27
2	Kondisi saluran rusak (ringan/berat) (km)	538,00	30,52	599,30	34,30	693,50	37,57	706,99	38,30	706.991	37,25
	<b>Total panjang saluran (km)</b>	<b>1.748,00</b>	100	<b>1.747,29</b>	100	<b>1.846,00</b>	100	<b>1.846,00</b>	100	<b>1.897.900</b>	100
1	Kondisi bangunan baik (unit)	3.656	69,15	3.898	71,69	4.258	75,87	4.258	75,87	4.347	77,46
2	Kondisi bangunan rusak (ringan/berat) (km)	1.611	30,85	1.539	28,31	1.354	24,13	1.354	24,13	1.265	22,54
	<b>Total Bangunan (Unit)</b>	<b>5.267</b>	100	<b>5.437</b>	100	<b>5.612</b>	100	<b>5.612</b>	100	<b>5.612</b>	100
	<b>Prosentase kondisi jaringan irigasi</b>										
	Kondisi baik (rerata saluran + bangunan)		<b>69,32</b>		<b>68,70</b>		<b>69,15</b>		<b>68,79</b>		<b>68,86</b>
	Kondisi rusak (rerata saluran + bangunan)		30,69		31,30		30,85		31,21		29,90

Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik = 1.143,832 Km

Total panjang jaringan irigasi = 1.897,900 Km

Jumlah bangunan dalam kondisi baik = 4.347,00 Buah

Total jumlah bangunan = 5.612,00 Buah

**Persentase Kinerja Jaringan Irigasi :**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jaringan irigasi}} \times 100 \% \\
 &= \left( \left( \frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jaringan irigasi}} \times 100 \% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah bangunan dalam kondisi baik}}{\text{Total jumlah bangunan}} \times 100 \% \right) \right) / 2 \\
 &= \left( \left( \frac{1.143,832}{1.897,900} \times 100\% \right) + \left( \frac{4.347}{5.612} \times 100\% \right) \right) / 2 \\
 &= 68,86\%
 \end{aligned}$$

**4. KEGIATAN PENGENDALIAN BANJIR TAHUN 2021**

Jumlah Desa Rawan Banjir = 459 Desa

Jumlah Desa yang dilakukan penanganan fisik = 25 Desa

Jumlah Desa se Jawa Timur = 8.051 Desa

**Persentase Penurunan Jumlah Desa yang terdampak kerugian akibat Banjir :**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah desa yang dilakukan penangan fisik}}{\text{Jumlah desa rawan banjir}} \times 100\% \\
 &= \frac{25}{459} \times 100\% \\
 &= 5,70\%
 \end{aligned}$$



### 3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,92 %	2,95 %	2,95 %
2	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,85 %	68,79 %	68,86 %
3	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	82,90 %	84,97 %	84,19 %
4	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,63 %	4,91 %	5,70 %
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,16	85,26	84,47

Sumber data : 1. Target (dari Renstra 2019-2024)  
2. Realisasi (Laporan Hasil Evaluasi SAKIP th. 2021, Laporan Pembangunan Tampung Air, Laporan Realisasi Tanam, Laporan Realisasi Alokasi Air, Laporan Kinerja Jaringan Irigasi, dan Laporan Penanganan Banjir)

### 3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TERHADAP RPJMD

Tabel 3.4  
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,98	2,95 %	101,03
2	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	69,00	68,86 %	100,01
3	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	83,20	84,19 %	102,76
4	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,51	5,70 %	102,33
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,46	84,47	100,37

Sumber data : 1. Target (dari Renstra 2019-2024)  
2. Realisasi (Laporan Hasil Evaluasi SAKIP th. 2021, Laporan Pembangunan Tampung Air, Laporan Realisasi Tanam, Laporan Realisasi Alokasi Air, Laporan Kinerja Jaringan Irigasi, dan Laporan Penanganan Banjir)

### 3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Berdasarkan data Tabel 3.1 tersebut, diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan.

**Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena :**

- a. Capaian kinerja Indeks Ketahanan Air sebesar 2,95 % meningkat/sama dengan tahun lalu dari target 2,92 %. Peningkatan capaian Indeks Ketahanan Air dikarenakan terdapat data yang tersedia pada tahun 2021, setelah pada perhitungan tahun 2020 data tersebut belum tersedia;
- b. Capaian kinerja Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik sebesar 68,86 % meningkat dari target 68,85 %. Peningkatan capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik dikarenakan penanganan jaringan irigasi melalui rehabilitasi fisik 34 Daerah Irigasi maupun peningkatan fungsi saluran dengan kegiatan operasi dan normalisasi pada 176 Daerah Irigasi dengan sumber pendanaan dari APBD, DAK dan IPDMIP;
- c. Capaian kinerja Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi sebesar 85,19 % meningkat dari target 82,90 %. Peningkatan Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi dikarenakan Kepatuhan pengguna air / petani dalam melaksanakan rencana tata tanam global (RTTG), Tata laksana pengaturan dan pembagian air irigasi telah dilakukan secara efektif dan efisien, Telah terlaksananya koordinasi kelembagaan pengelola irigasi dengan baik di tingkat Pemerintah maupun HIPPA / GHIPPA, Terus berupaya melakukan inovasi-inovasi sehingga petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) dilapangan dapat memberikan laporan akurat / up to date kepada petugas di kantor (melalui aplikasi pelaporan).
- d. Adanya Pandemi menyebabkan aktivitas perekonomian menurun sehingga ketersediaan air tercukupi;
- e. Realisasi Alokasi air sesuai dengan rencana;
- f. Capaian kinerja Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir sebesar 5,70 % meningkat dari target 5,57 %.

Peningkatan Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir dikarenakan Tahun 2021 banyak kegiatan normalisasi untuk mengurangi kejadian banjir berupa genangan di beberapa titik namun demikian masih banyak lokasi rawan banjir yang belum dilakukan normalisasi.

**Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian Realisasi Kinerja pada tahun 2021 diantaranya :**

- Persentase Kondisi fisik prasarana irigasi dalam kondisi baik:
  - Laju kerusakan lebih cepat dibandingkan dengan tingkat perbaikan/pemeliharaan
- Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi:
  - Kurangnya kemampuan SDM dalam pengoperasian pembagian air
  - Kurang patuhnya petani pemakai air terhadap rencana tata tanam
- Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir:
  - Adanya alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan tempat usaha di wilayah sempadan sungai
  - Kapasitas tampungan sungai yang semakin sedikit dikarenakan adanya sedimentasi
  - Beberapa bangunan air (parapet, bronjong, tanggul) mengalami erosi/longsor/ rusak
  - Adanya kerusakan pada pompa banjir di titik-titik rawan banjir
  - Kurangnya pemasangan titik pantau (TMA/data hujan) baik secara digitalisasi/manual untuk memonitoring Tinggi muka air dan curah hujan
  - Kurangnya monitoring realtime terkait lokasi rawan banjir
  - Kurangnya data studi dan inventarisasi tentang sungai yang uptodate
  - Perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten serta OPD terkait penanganan darurat dan permanen dalam menangani banjir



Dalam rangka meminimalisir kendala-kendala tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Persentase Kondisi fisik prasarana irigasi dalam kondisi baik:
  - memberikan prioritas terhadap kegiatan fisik (pemeliharaan/rehabilitasi) untuk mengoptimalkan faktor kehilangan air
- Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi:
  - Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas OP terkait peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan irigasi
  - Melaksanakan pelatihan teknis kepada HIPPA/GHIPPA (petani pemakai air)
- Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir:
  - Merencanakan biaya operasional untuk tenaga OP sungai di titik rawan banjir
  - Pengendalian ijin penggunaan lahan di wilayah sempadan sungai atau daerah resapan air
  - Pelaksanaan Normalisasi disungai-sungai prioritas rawan banjir
  - Pelaksanaan perbaikan dan penanganan permanen (perkuatan tebing, parapet, tanggul) di wilayah sungai prioritas
  - Perlu adanya perbaikan berkala dan pemantauan operasi pompa banjir
  - Pembuatan stasiun hidrometri (pengukur curah hujan dan pengukur tinggi muka air) di lokasi - lokasi prioritas sebagai real time data dan penentuan status siaga
  - Pembangunan Integrated control room sebagai bank data dan pusat kendali penanganan banjir
  - Menganggarkan studi Inventarisasi, SID, DED di sungai yang rawan banjir
  - Membuat agenda rapat koordinasi yang terjadwal antara instansi terkait (contoh melalui forum TKPSDA) dan membuat grup informasi data penanganan antara OPD terkait penanganan darurat bencana banjir

### **Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan**

Pada tahun 2021, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan dana yang bersumber dari APBN untuk Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TP-OP) Daerah Irigasi Kewenangan Pusat yang berada di Wilayah Jawa Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.456.433.000,00 dengan realisasi Rp 88.470.221.000,00 atau 98,90 % .

### **Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan kegiatan SKPD-TP yang dilakukan selama TA. 2021 terdapat berbagai permasalahan antara lain :

#### **1. Permasalahan terkait Teknis dan Lapangan, yaitu :**

- Pandemi Covid – 19 yang belum berakhir sangat berpengaruh pada di segala kegiatan baik teknis, fisik maupun administrasi.
- Kesulitan koordinasi yang terkait waktu dan lokasi kegiatan rehap dengan pelaksanaan kegiatan lainnya.
- Selisih harga satuan barang di wilayah yang berbeda – beda.
- Inventarisasi aset data NUP (Nomor Urut Pendaftaran) pada SIMAK-BMN di BBWS Bengawan Solo, terkait permintaan RKPBMN oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan Dirjen SDA sebagai pendukung penganggaran TPOP.
- Terbatasnya sarana dan prasarana akomodasi yang digunakan untuk penunjang pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas aliran jaringan irigasi.



## **2. Permasalahan terkait Sumber Daya Manusia, yaitu :**

- Pada beberapa Pemerintah Daerah Juru/Tenaga Teknis Sumber Daya Air dimutasi ke bidang kerja non Sumber Daya Air serta formasi tenaga teknis Sumber Daya Air diisi oleh tenaga dari bidang lain non-Sumber Daya Air.
- Mutu SDM Tenaga Teknis Sumber Daya Air yang masih belum mumpuni.
- Pelibatan tenaga teknis dari Pemda Kabupaten/Kota perlu dievaluasi, terkait rangkap tugas yaitu harus menjalankan Tugas utama sebagai tenaga OP pada Jaringan Irigasi Kab/Kota maupun Provinsi, di lain pihak juga harus melaksanakan tugas OP pada Jaringan Irigasi Pusat melalui Tugas Pembantuan.
- Efisiensi kerja tenaga kontrak pelaksana O & P yang perlu masih perlu ditingkatkan.

## **Usulan solusi terkait permasalahan di atas, dalam rangka pelaksana antara lain :**

- Menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah baik di lapangan maupun di dalam kantor.
- Memberikan standarisasi kinerja mengenai apa saja yang bisa diserap hingga urutan penyerapannya (ketentuan prioritas penyerapan kegiatan).
- Tidak mentolerir adanya kegiatan yang terlambat pengambilannya karena seharusnya kegiatan dilakukan di awal bulan triwulan.
- Mengalokasikan dana dan data untuk wilayah atau lokasi yang langganan bencana agar diantisipasi lebih dini.
- Melaksanakan kegiatan survey jaringan irigasi disertai dengan pengisian blangko O dan P, foto pendukung (0% , 50%, dan 100%) serta koordinat untuk meminimalisasi terjadinya revisi dan sebagai

pembeda antara yang prioritas dengan yang tidak dalam kegiatan berkala.

- Menggunakan standarisasi satuan harga gubernur per wilayah agar kuantitasnya sama berdasarkan kebutuhan prioritas.
- Menghimpun data Inventarisasi aset data NUP (Nomor Urut Pendaftaran) pada SIMAK-BMN di masing – masing Balai Besar Wilayah Sungai.

**Diusulkan solusi terkait Sumber Daya Manusia, yaitu :**

- Usulan untuk mengangkat tenaga Non-PNS dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi Juru Sumber Daya Air.
- Jika ada yang purna atau pensiun utamanya tenaga juru, akan kami usulkan korlap (koordinator lapangan) baru agar pusat memiliki tenaga juru yang dari pusat sehingga koordinasinya dapat dengan mudah dilaksanakan.
- Diusulkan solusi terkait Sumber Daya Manusia kedepan secara bertahap tenaga teknis dari Kabupaten/kota yang telah purna tugas (pension) diganti oleh tenaga teknis yang murni mengelola Daerah Irigasi yang di TP-kan.
- Diusulkan untuk melengkapi peralatan penunjang pelaksanaan kerja yang bersifat mekanisasi. contoh : grass cutter, sepeda motor, seragam, mesin potong rumput, dan sebagainya.
- Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga Penjaga Pintu Air (PPA) agar menjadi SDM yang lebih berkualitas.

### 3.1.5 ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.5  
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	188.549.399.426	37,84
2	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	114.027.815.587	22,89
3	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	24.094.797.505	4,84
4	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	59.217.510.301	11,89
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	112.355.172.181	22,55

Sumber data : 1. Target (dari Renstra 2019-2024)  
2. Realisasi (Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, Laporan Pembangunan Tampung Air, Laporan Realisasi Tanam, Laporan Realisasi Alokasi Air, Laporan Kinerja Jaringan Irigasi, dan Laporan Penanganan Banjir)

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,92 %	2,95 %	101,03	188.549.399.426	187.029.007.031	99,19
Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,85 %	68,86 %	100,01	114.027.815.587	73.738.003.324	74,43
Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	82,90 %	85,19 %	102,76	24.094.797.505	23.420.423.963	97,20
Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,57 %	5,70 %	102,33	59.217.510.301	44.116.498.811	74,50
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,16	84,47	100,37	112.355.172.181	105.690.718.293	94,07

Sumber data : 1. Target (dari Renstra 2019-2024)  
2. Realisasi (Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, Laporan Pembangunan Tampung Air, Laporan Realisasi Tanam, Laporan Realisasi Alokasi Air, Laporan Kinerja Jaringan Irigasi, dan Laporan Penanganan Banjir)

### **3.1.6 ANALIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

#### **Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

##### **a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program tersebut didukung oleh Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, dengan indikator kinerja yaitu :
  - Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup Tampungan air yang diselesaikan dengan target 1 dan realisasi 1.
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, dengan indikator kinerja yaitu :
  - Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup pengendalian banjir yang diselesaikan dengan target 11 dan realisasi 11.
- Sub kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu :
  - Jumlah kegiatan dalam rangka mendukung Pola dan Perencanaan SDA yang dilaksanakan dengan target 1 dan realisasi 1.
- Sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan indikator kinerja yaitu :
  - Jumlah sungai yang direhabilitas dengan target 1 dan realisasi 1
  - Panjang tebing sungai yang direhabilitasi dengan target 2500 dan realisasi 2540
- Sub kegiatan Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) dengan indikator kinerja yaitu :
  - Peta Kejadian Banjir yang dibuat dengan target 6 dan realisasi 6
  - Laporan Kejadian Banjir dengan target 38 dan realisasi 38
  - SOP Penanggulangan Banjir dengan target 1 dan realisasi 1



- Sub kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing dengan indikator kinerja yaitu :
  - Jumlah sungai yang disurvei kondisi tanggulnya UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 11 dan realisasi 11.
  - Jumlah ruas sungai yang dinormalisasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 3 dan realisasi 3.
  - Panjang tebing sungai/badan air yang diperbaiki UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 150 dan realisasi 150.
  - Panjang tebing sungai/badan air yang diperbaiki UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 70 dan realisasi 70.
  - Jumlah ruas sungai yang dinormalisasi UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 2 dan realisasi 2.
  - Jumlah sungai yang disurvei kondisi tanggulnya UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.
  - Jumlah sungai yang disurvei kondisi tanggulnya UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 2 dan realisasi 2.
  - Jumlah sungai yang disurvei kondisi tanggulnya UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 2 dan realisasi 2.
- Sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai dengan indikator kinerja yaitu :
  - Jumlah badan air yang dinormalisasi dengan target 4 dan realisasi 15
  - Volume sedimen yang dinormalisasi dengan target 60.000 dan realisasi 98.947
- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai dengan indikator kinerja yaitu :
  - Laporan Tanggul Kritis dengan target 1 dan realisasi 1
  - Laporan Kondisi Kerusakan Sungai target 1 dan realisasi 1.
- Sub kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu :
  - Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 113 dan realisasi 113.
  - Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 145 dan realisasi 145.



- Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.
- Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 94 dan realisasi 94.
- Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 68 dan realisasi 68.
- Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 3 dan realisasi 3.
- Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 1 dan realisasi 1.
- Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 10 dan realisasi 10.
- Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 19 dan realisasi 19.
- Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 10 dan realisasi 10.
- Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 6 dan realisasi 6.
- Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di Bidang PSDA dengan target 6 dan realisasi 6.
- Jumlah data pos klimatologi yang dikelola datanya di Bidang PSDA dengan target 4 dan realisasi 4.
- Jumlah data kualitas air yang dikelola datanya di Bidang PSDA dengan target 4 dan realisasi 4.
- Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu :
  - Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Bidang Sungai, Waduk dan Pantai dengan target 256 dan realisasi 255.
  - Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Bidang Irigasi dengan target 324 dan realisasi 321

- Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Bidang Bina Manfaat dengan target 373 dan realisasi 370.
- Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dengan target 291 dan realisasi 290.
- Sub kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu :
  - Jumlah rekomendasi teknik yang diterbitkan di Bidang Bina Manfaat dengan target 180 dan realisasi 328.
  - Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Daya Air di Bidang Bina Manfaat dengan target 2 dan realisasi 2.
  - Rekomendasi Aset Sumber Daya Air yang diusahakan di Bidang Bina Manfaat dengan target 1 dan realisasi 1.
  - Rekomendasi WIUP di Bidang Bina Manfaat dengan target 1 dan realisasi 1.
  - Dokumen Pengelolaan Aset/Barang Milk Daerah penggunaan Dinas Sumber Daya Air di Bidang Bina Manfaat dengan target 4 dan realisasi 4.
  - Dokumen Percepatan Sertifikasi Tanah di Bidang Bina Manfaat dengan target 4 dan realisasi 4.
  - Dokumen Inventarisasi Aset di Bidang Bina Manfaat dengan target 4 dan realisasi 4.
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu :
  - Pelatihan O dan P Jaringan Irigasi Partisipatif HIPPA/G. HIPPA/I. HIPPA/F. HIPPA yang dilaksanakan di Bidang Bina Manfaat dengan target 4 dan realisasi 4.
  - Jumlah dokumen naskah kerjasama yang ditanda tangani di Bidang Bina Manfaat dengan target 1 dan realisasi 1.
  - Jumlah Komunitas Sungai yang dibina di Bidang Sungai Waduk Pantai dengan target 1 dan realisasi 1.

- Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di Bidang Sungai Waduk Pantai dengan target 2 dan realisasi 2.
- Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Brantas dengan target 1 dan realisasi 1.
- Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 1 dan realisasi 1.
- Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 1 dan realisasi 1.
- Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.
- Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 2 dan realisasi 2.
- Jumlah Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti di UPT PSDA WS Kep. Madura dengan target 1 dan realisasi 1.
- Lomba Penilaian Kinerja HIPPA dan G. HIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan Bidang Bina Manfaat dengan target 1 dan realisasi 1.
- Pendataan dan Inventarisasi Data HIPPA dan GHIPPA di Bidang Bina Manfaat dengan target 1 dan realisasi 1.
- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dengan indikator kinerja yaitu :
  - Jumlah Badan air (Sungai dan Waduk) yang dimonitor datanya di Bidang Sungai Waduk Pantai dengan target 3 dan realisasi 3.
  - Jumlah lokasi aset yang diamankan/ditertibkan dengan target 4 dan realisasi 4.
  - Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Brantas dengan target 1 dan realisasi 1.

- Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 2 dan realisasi 2.
- Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 5 dan realisasi 5.
- Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.
- Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 1 dan realisasi 1.
- Jumlah Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 1 dan realisasi 1.
- Sosialisasi Pengendalian dan Pemakaian Tanah di Bidang Bina Manfaat dengan target 2 dan realisasi 2.
- Aset Sumber Daya Air yang diamankan di Bidang Bina Manfaat dengan target 3 dan realisasi 3.
- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air dengan indikator kinerja yaitu :
  - Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Brantas dengan target 1 dan realisasi 1.
  - Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 2 dan realisasi 2.
  - Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 1 dan realisasi 1.
  - Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.
  - Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 1 dan realisasi 1.
  - Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 3 dan realisasi 3.
  - Jumlah mata air yang dipelihara dengan target 6 dan realisasi 6.
  - Jumlah lokasi kegiatan pengawetan air dengan target 6 dan realisasi 6.
  - Jumlah titik biopori/ bibit pohon untuk kegiatan konservasi dengan target 6 dan realisasi 32.



Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan indikator kinerja yaitu:
  - Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup irigasi yang siap bangun dengan target 2 dan realisasi 2.
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator kinerja yaitu:
  - Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Brantas dengan target 10 dan realisasi 10.
  - Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Brantas dengan target 1000 dan realisasi 1000.
  - Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Brantas dengan target 1 dan realisasi 1.
  - Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 1000 dan realisasi 1000.
  - Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 2 dan realisasi 2.
  - Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 4 dan realisasi 4.
  - Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 770 dan realisasi 770.
  - Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 4 dan realisasi 4.
  - Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 3 dan realisasi 3.
  - Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 728 dan realisasi 728.
  - Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 2 dan realisasi 2.

- Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 6 dan realisasi 6.
- Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2000 dan realisasi 2000.
- Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 1 dan realisasi 1.
- Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 1 dan realisasi 1.
- Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 3830 dan realisasi 3830.
- Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 1 dan realisasi 1.
- Sub kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi dengan indikator kinerja yaitu: Jumlah DI yang dikelola kegiatan rehabilitasinya dengan target 23 dan realisasi 23.
- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator kinerja yaitu:
  - Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 4 dan realisasi 4.
  - Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang di operasikan UPT PSDA WS Kep Madura dengan target 5 dan realisasi 5.
  - Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang di operasikan UPT PSDA WS Brantas dengan target 55 dan realisasi 55.
  - Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang di operasikan UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 13 dan realisasi 13.
  - Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 1 dan realisasi 1.
  - Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang di operasikan UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 8 dan realisasi 8.
  - Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang di operasikan UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 1 dan realisasi 1.
  - Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 1 dan realisasi 1.



- Sub kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi dengan indikator kinerja yaitu:
  - Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 1 dan realisasi 1.
  - Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 5 dan realisasi 5.
  - Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan target 4 dan realisasi 4.
  - Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Brantas dengan target 55 dan realisasi 55.
  - Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 26 dan realisasi 26.
  - Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 44 dan realisasi 44.
  - Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 10 dan realisasi 10.
  - Jumlah pintu air yang dipelihara UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 58 dan realisasi 58.
  - Jumlah alat ukur yang dipelihara UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 1 dan realisasi 1.
  - Jumlah alat ukur yang dipelihara UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 9 dan realisasi 9.
  - Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 13 dan realisasi 13.
  - Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Brantas dengan target 55 dan realisasi 55.
  - Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 13 dan realisasi 13.
  - Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 58 dan realisasi 58.
  - Jumlah DI yang dikelola muka air secara real time UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 25 dan realisasi 25.
  - Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan target 2 dan realisasi 2.

- Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan target 10 dan realisasi 10.
- Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target 3 dan realisasi 3.
- Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Brantas dengan target 9 dan realisasi 9.
- Jumlah Kabupaten yang dikelola rencana tata tanamnya UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target 2 dan realisasi 2.

## **3.2. REALISASI ANGGARAN**

### **3.2.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan pagu APBD Murni 518.908.381.382 sebesar Rp. pagu PAPBD sebesar Rp. 385.889.522.819, terealisasi sebesar 85,08 % atau Rp. 328.304.093.129

- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu APBD Murni 379.075.1102.377 sebesar Rp. pagu PAPBD sebesar Rp. 247.766.909.727, terealisasi sebesar 93,29 % atau Rp. 231.145.665.842
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu APBD Murni 139.833.279.005 sebesar Rp. pagu PAPBD sebesar Rp. 138.122.613.092, terealisasi sebesar 70,34 % atau Rp. 97.158.427.287

### 3.2.2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 130.076.844.618, pagu PAPBD sebesar Rp. 112.355.172.181, terealisasi sebesar 94,07 % atau Rp. 105.690.718.293

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 266.404.900, pagu PAPBD sebesar Rp. 235.967.800, terealisasi sebesar 82,40 % atau Rp. 194.444.069
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 113.979.776.956, pagu PAPBD sebesar Rp. 98.311.148.956, terealisasi sebesar 94,61 % atau Rp. 93.014.201.131
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 6.120.557.470, pagu PAPBD sebesar Rp. 4.992.853.078, terealisasi sebesar 92,89 % atau Rp. 4.637.788.900
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 488.006.202, pagu PAPBD sebesar Rp. 283.913.360, terealisasi sebesar 85,99 % atau Rp. 244.125.400
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 5.616.918.440, pagu PAPBD sebesar Rp. 5.505.399.249, terealisasi sebesar 90,32 % atau Rp. 4.972.660.864

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu APBD Murni sebesar Rp. 3.605.180.650, pagu PAPBD sebesar Rp. 3.025.889.738, terealisasi sebesar 86,83 % atau Rp. 2.627.497.929

### **3.2.3 Program Pengelolaan Sumber Daya Air**

Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan pagu APBN Murni sebesar Rp. 89.456.433.000, terealisasi sebesar 98,90 % atau Rp. 88.470.221.000.

### **3.3. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air akan tetap di Evaluasi dan dipertahankan untuk perbaikan kedepannya;
- Kecukupan pada ukuran keberhasilan akan di evaluasi dengan memperhatikan indikasi pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan hasil program di semua level;
- Akan dilakukan secara rutin rapat monitoring dan evaluasi kinerja.



**LKjIP 2021**

**BAB IV**

**PENUTUP**





## BAB IV

# P E N U T U P

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta menganalisa terhadap pengukuran kinerja.

Evaluasi pada tahun 2021 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan :

Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Air mendapatkan nilai capaian sebesar 101,03 %.



- Sasaran 2 Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki :

Indikator Kinerja Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik mendapatkan nilai capaian sebesar 100,01 %.

- Sasaran 3 Meningkatkan Keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat :

Indikator Kinerja Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi mendapatkan nilai capaian sebesar 102,76 %.

- Sasaran 4 Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi :

Indikator Kinerja Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir mendapatkan nilai capaian sebesar 102,33 %.

- Sasaran 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah :

Indikator Kinerja nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah mendapatkan nilai capaian sebesar 100,37 %.

#### 4.2 LANGKAH – LANGKAH DI MASA MENDATANG

Untuk meningkatkan Kinerja di masa mendatang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Usulan untuk mengangkat tenaga Non-PNS dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi Juru Sumber Daya Air;
- 2) Melaksanakan kegiatan lelang konstruksi di awal tahun;
- 3) Meningkatkan kualitas kegiatan Operasi Irigasi untuk mempertahankan Kinerja Jaringan dan Layanan Air;
- 4) Mengefisiensikan seluruh kegiatan operasi dan pemeliharaan untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan membuat skala prioritas kegiatan yang strategis dan urgent dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
- 5) Dengan keterbatasan kondisi saat ini maka hampir semua kegiatan pelaporan dilakukan melalui aplikasi Elektronik.
- 6) Perlu adanya monitoring dan evaluasi lebih intensif dan membuat action plan sebelum pelaksanaan.
- 7) Perlunya evaluasi terkait perbaikan mutu dilapangan dan perapian dalam masa pemeliharaan oleh penyedia jasa.
- 8) Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia maka Dinas PU Sumber Daya Air perlu menambahkan skill / keterampilan dari masing-masing SDM agar lebih berkualitas dengan melalui kegiatan daring.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

**LKjIP 2021**

# LAMPIRAN- LAMPIRAN



FORM PENDANAAN  
Program dan kegiatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	(1.03.02) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	BELANJA PEGAWAI				112.074.093.000		118.608.298.840		121.107.893.532		129.090.400.205		129.090.400.205
				BELANJA BARANG/JASA, BUNGA DAN MODAL				81.103.590.000		118.012.392.619		120.499.428.947		128.441.830.295		128.441.830.295
				BELANJA HIBAH				307.278.870.000		662.252.835.738		676.209.394.320		720.779.949.111		720.779.949.111
								500.456.553.000		898.873.527.196		917.816.716.799		978.312.179.611		978.312.179.611
								988.967.325	2	1.250.000.000	2	1.250.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup pengendalian banjir yang diselesaikan	Dokumen	8	8	6.661.000.000	9	6.750.000.000	9	6.750.000.000	10	7.000.000.000	10	7.000.000.000
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan dalam rangka mendukung Pola dan Perencanaan SDA yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5	1.187.607.565	5	1.310.877.109	5	1.187.607.565	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000
			Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Peta Kejadian Banjir tahunan yang dibuat	WS	6	6	437.794.223	6	437.794.223	6	437.794.223	6	437.794.223	6	437.794.223
				Laporan Kejadian Banjir dalam satu periode musim hujan	Laporan											
			Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Tebing Sungai/badan air yang diperbaiki pada UPT PSDA WS Sampean Setail	Meter	0	0		0		0		0		0	
				Jumlah Ruas Sungai yang dinormalisasi pada UPT PSDA WS Sampean Setail	Ruas Sungai	0	0		0		0		0		0	
				Jumlah Ruas sungai yang ditangani pada UPT PSDA WS Sampean Setail	Ruas Sungai	0	0		0		0		0		0	
				Jumlah sungai yang disurvei tanggulnya pada UPT PSDA WS Sampean Setail	Sungai	5	5	42.285.285	5	42.285.285	5	42.285.285	5	42.285.285	5	42.285.285
				Panjang Tebing Sungai/badan air yang diperbaiki pada UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Meter	75	0		0		75	1.000.000.000	0		0	
				Jumlah Ruas Sungai yang dinormalisasi pada UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Ruas Sungai	0	0		0		0		0		0	
				Jumlah Ruas sungai yang ditangani pada UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Ruas Sungai	5	0		0		5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000
				Jumlah sungai yang disurvei tanggulnya pada UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Sungai	10	10	49.105.500	10	49.105.900	10	49.105.900	10	49.105.900	10	49.105.900
				Panjang Tebing Sungai/badan air yang diperbaiki pada UPT PSDA WS Welang Pekalen	Meter	60	60	1.518.199.945	60	1.518.199.945	60	1.518.199.945	60	1.518.199.945	60	1.518.199.945
				Jumlah Ruas Sungai yang dinormalisasi pada UPT PSDA WS Welang Pekalen	Ruas Sungai	2	0		0		0		0		0	
				Jumlah Ruas sungai yang ditangani pada UPT PSDA WS Welang Pekalen	Ruas Sungai	2	0		0		0		0		0	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah sungai yang disurvei tanggulnya pada UPT PSDA WS Welang Pekalen	Sungai	5	0		0		0		0		0	
				Panjang Tebing Sungai/badan air yang diperbaiki pada UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Meter	0	0		0		0		0		0	
				Jumlah Ruas Sungai yang dinormalisasi pada UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Ruas Sungai	1	0		0		0		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000
				Jumlah Ruas sungai yang ditangani pada UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Ruas Sungai	1	1	837.805.100	1	837.805.100	1	837.805.100	1	837.805.100	1	837.805.100
				Jumlah sungai yang disurvei tanggulnya pada UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Sungai	5	0		0		0		0		0	
			Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Jumlah badan air yang dinormalisasi	Lokasi	4	4	5.711.287.800	4	8.146.787.800	8	6.321.593.672	10	7.000.000.000	10	7.000.000.000
				Volume sedimen yang dinormalisasi	M3	75000	75000		75000		95000		105000		105000	
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Laporan Tanggul Kritis Sungai Rawan Banjir Jawa Timur	Laporan	1	1	2.917.948.379	1	2.917.948.379	1	2.917.948.379	1	2.917.948.379	1	2.917.948.379
				Laporan Kondisi Kerusakan Sungai di Jawa Timur	Laporan	1	1		1		1		1		1	
			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah pos hujan yang dikelola datanya (pos)	Pos	724	724		724		724		724		724	
				Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya (pos)	Pos	6	6		6		6		6		6	
				Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya (titik)	Titik	45	45		45		45		45		45	
				Jumlah Pembinaan Teknis kegiatan SIH3 yang dilaksanakan	Bintek	2	2	576.180.510	2	576.180.510	2	576.180.510	2	576.180.510	2	576.180.510
				Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Setail	Pos	113	113	433.382.455	113	433.382.455	113	433.382.455	113	433.382.455	113	433.382.455
				Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Setail	Pos	0	0		0		0		0		0	
				Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Setail	Titik	10	10		10		10		10		10	
				Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Pos	145	145	704.674.100	145	704.674.100	145	704.674.100	145	704.674.100	145	704.674.100
				Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Pos	2	2		2		2		2		2	
				Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Titik	19	19		19		19		19		19	
				Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Welang Pekalen	Pos	94	94	479.400.000	94	479.400.000	94	479.400.000	94	479.400.000	94	479.400.000
				Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Welang Pekalen	Pos	1	1		1		1		1		1	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Welang Pekalen	Titik	10	10		10		10		10		10	
				Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Pos	68	68	543.437.954	68	543.437.954	68	543.437.954	68	543.437.954	68	543.437.954
				Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Pos	3	3		3		3		3		3	
				Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Titik	6	6		6		6		6		6	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air	Pokmas	1506	1506	307.278.870.000	3.300	662.252.835.738	3.400	676.209.394.320	3.600	720.779.949.111	3.600	720.779.949.111
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi teknik yang diterbitkan	Rekomendasi	180	180	1.208.664.700	180	1.208.664.700	180	1.208.664.700	180	1.208.664.700	180	1.208.664.700
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Komunitas Sungai yang dilaksanakan pembinaannya oleh Bidang Sungai, Waduk dan Pantai	Kelompok	1	1	214.989.263	1	214.989.263	1	214.989.263	1	214.989.263	1	214.989.263
				Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti	Laporan	2	2		2		2		2		2	
				Jumlah dokumen naskah kerjasama yang diproses dan ditanda tangani	Naskah	1	1		1		1		1		1	
				Jumlah pelatihan teknis untuk Petani Pemakai Air yang dilaksanakan	Bintek	5	5	540.135.280	5	540.135.280	5	540.135.280	5	540.135.280	5	540.135.280
				Jumlah Risalah Sidang Dewan SDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti	Risalah	1	1	253.200.000	1	253.200.000	1	253.200.000	1	253.200.000	1	253.200.000
				Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Brantas)	Laporan	1	1		1		1		1		1	
				Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Bengawan Solo)	Laporan	1	1		1		1		1		1	
				Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Welang Rejoso)	Laporan	2	2	103.394.340	2	103.394.340	2	103.394.340	2	103.394.340	2	103.394.340
				Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Pekalen Sampean)	Laporan	1	1	61.693.804	1	61.693.804	1	61.693.804	1	61.693.804	1	61.693.804
				Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Bondoyudo Bedadung)	Laporan	2	2	92.180.800	2	92.180.800	2	92.180.800	2	92.180.800	2	92.180.800





[illegible]

[illegible]

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah Bendung dan Jaringan Irigasi yang dioperasikan pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Welang Pekalen	Unit	1	1	2.415.260.000	1	3.415.260.000	1	3.415.260.000	1	4.415.260.000	1	4.415.260.000
				Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	DI	4	4		4		4		4		4	
				Panjang Saluran irigasi yang dipelihara pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Meter											
				Jumlah Bendung dan Jaringan Irigasi yang dioperasikan pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Unit	5	5	1.740.583.470	5	1.240.583.470	5	1.240.583.470	5	3.240.583.470	5	3.240.583.470
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah DI yang dipantau muka airnya real time	DI					6.079.599.291		7.079.599.291		8.079.599.291		8.079.599.291
				Jumlah Kabupaten yang dikelola Rencana Tata Tanamnya	Kabupaten/Kota			1.491.038.200								
				Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Brantas	DI	55	55	1.076.340.300	55		55		55		55	
				Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Bengawan Solo	DI	58	58	848.361.700	58		58		58		58	
				Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Sampean Setail	DI	13	13	63.406.204	13		13		13		13	
				Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	DI	13	13	1.049.857.300	13		13		13		13	
				Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Welang Pekalen	DI	25	25	255.400.639	25		25		25		25	
				Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	DI	5	5	1.461.216.648	5		5		5		5	
2	(X.XX.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	11	11	20.032.700	11	20.032.700	11	20.032.700	11	20.032.700	11	20.032.700
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700
			Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Jumlah dokumen DFA	Dokumen	1	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	Jumlah dokumen DFA Perubahan	Dokumen	1	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700	1	22.032.700

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	5	5	69.248.700	5	69.248.700	5	69.248.700	5	69.248.700	5	69.248.700
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Kegiatan	4	4	88.992.700	4	88.992.700	4	88.992.700	4	88.992.700	4	88.992.700
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	12	12	112.074.093.000	12	118.608.298.840	12	121.107.893.532	12	129.090.400.205	12	129.090.400.205
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Laporan	12	12	1.724.034.100	12	1.724.034.100	12	1.724.034.100	12	1.724.034.100	12	1.724.034.100
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Lapoan Verifikasi Penatausahaan	Laporan	12	12	29.362.700	12	29.362.700	12	29.362.700	12	29.362.700	12	29.362.700
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Laporan	12	12	23.782.700	12	23.782.700	12	23.782.700	12	23.782.700	12	23.782.700
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran SKPD	Dokumen	2	2	23.032.700	2	23.032.700	2	23.032.700	2	23.032.700	2	23.032.700
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	Dokumen	1	1	18.340.100	1	18.340.100	1	18.340.100	1	18.340.100	1	18.340.100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	12	12	57.532.100	12	57.532.100	12	57.532.100	12	57.532.100	12	57.532.100
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Laporan	1	1	29.599.556	1	29.599.556	1	29.599.556	1	29.599.556	1	29.599.556
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasana yang Terpenuhi	Paket	12	12	3.954.872.620	12	3.954.872.620	12	3.954.872.620	12	3.954.872.620	12	3.954.872.620
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	12	12	539.666.100	12	539.666.100	12	539.666.100	12	539.666.100	12	539.666.100
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	12	12	956.779.300	12	956.779.300	12	956.779.300	12	956.779.300	12	956.779.300
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP yang Tepat Waktu	Laporan	12	12	669.239.450	12	669.239.450	12	669.239.450	12	669.239.450	12	669.239.450
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Kali	12	12	405.468.142	12	405.468.142	12	405.468.142	12	405.468.142	12	405.468.142
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Daftar Arsip Aktif	Laporan	1	1	82.538.060	1	82.538.060	1	82.538.060	1	82.538.060	1	82.538.060
				Jumlah Laporan Daftar Arsip Inaktif	Laporan	1	1		1		1		1		1	
				Jumlah Laporan Daftar Arsip Vital	Laporan	1	1		1		1		1		1	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	1 Paket	1	1	2.163.840	1	2.163.840	1	2.163.840	1	2.163.840	1	2.163.840
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12	12	1.797.972.753	12	1.797.972.753	12	1.797.972.753	12	1.797.972.753	12	1.797.972.753
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Paket	13	13	441.909.247	13	441.909.247	13	441.909.247	13	441.909.247	13	441.909.247
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	13 Paket	13	13	3.370.272.600	13	3.370.272.600	13	3.370.272.600	13	3.370.272.600	13	3.370.272.600
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	1 Paket	1	1	33.011.500	1	33.011.500	1	33.011.500	1	33.011.500	1	33.011.500
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	140	140	1.333.237.410	140	1.333.237.410	140	1.333.237.410	140	1.333.237.410	140	1.333.237.410
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Paket	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket		7	513.654.340	7	513.654.340	7	513.654.340	7	513.654.340	7	513.654.340
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	Paket		6	1.724.877.400	6	1.724.877.400	6	1.724.877.400	6	1.724.877.400	6	1.724.877.400



**PENGUKURAN KINERJA**  
**DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN 2021**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		CAPAIAN
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,92	2,95	2,95	101,03
	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa /Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,85	68,79	68,86	100,01
	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	82,90	84,97	85,19	102,76
	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,57	4,91	5,70	100,33
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,16	85,26	84,47	100,37



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. BAJU TRIHAKSORO, M.M

Jabatan : Plt. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Januari 2021



Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Pihak Pertama,  
**PLT. KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Ir. BAJU TRIHAKSORO, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650823 199403 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	14,32 %
2.	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,85 %
3.	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	82,9 %
4.	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,57 %
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,16 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 130.076.844.618,00	APBD
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 519.735.381.382,00	APBD
Jumlah (APBD)	Rp. 649.812.226.000,00	
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 90.782.481.000,00	APBN
Jumlah APBD dan APBN	Rp. 740.594.707.000,00	

Surabaya, Januari 2021

Pihak Kedua  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**



**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Pihak Pertama  
**Pt. KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

  
**Ir. BAJU TRIHAKSORO, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650823 199403 1 008





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. MUHAMMAD ISA ANSHORI, ATD., MT

Jabatan : Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Oktober 2021



Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Dr. MUHAMMAD ISA ANSHORI, ATD., MT**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700916 199403 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,92 %
2.	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	Persentase kondisi prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,85 %
3.	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	82,9 %
4.	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Persentase penurunan jumlah desa yang terdampak kerugian akibat banjir	5,57 %
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	84,16 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 114.122.516.828,00	P-APBD
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 385.997.420.172,00	P-APBD
Jumlah (APBD)	Rp. <b>500.119.937.000,00</b>	
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 89.456.433.000,00	APBN
Jumlah P-APBD dan APBN	Rp. <b>589.576.370.000,00</b>	

Surabaya, Oktober 2021

Pihak Kedua  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**



**KHOIFAH INDAR PARAWANSA**

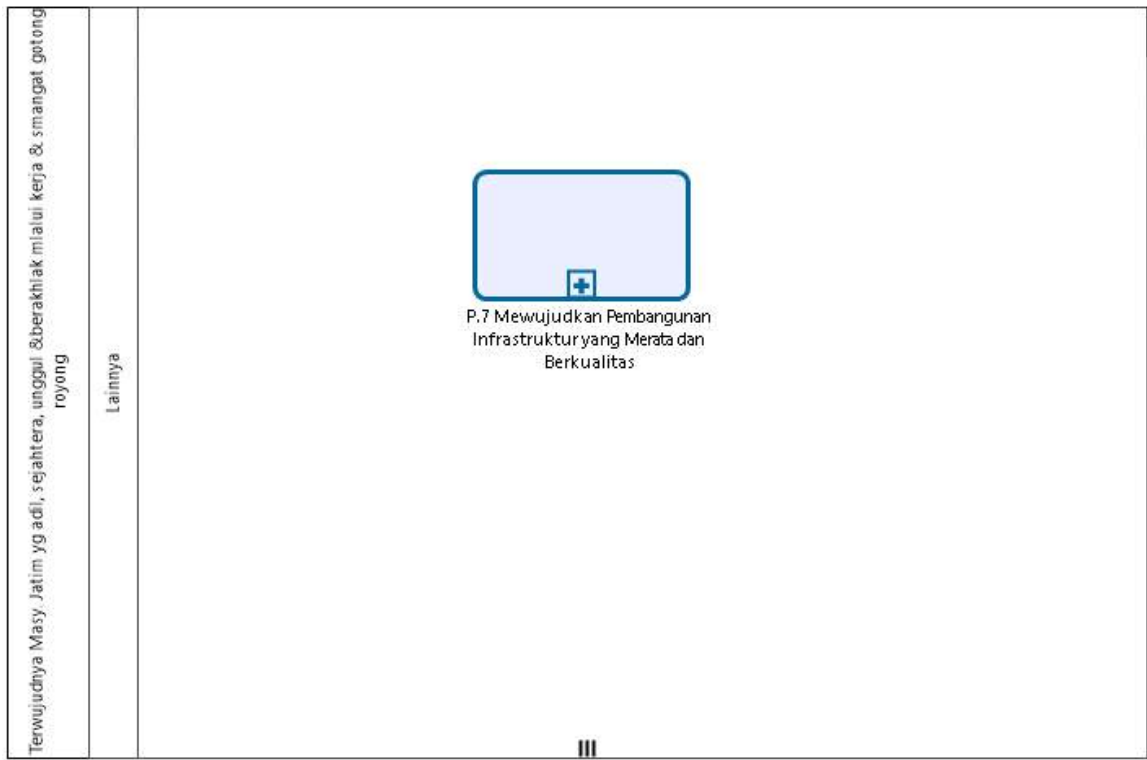
Pihak Pertama  
**KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Dr. MUHAMMAD ISA ANSHORI, ATD., MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700916 199403 1 006

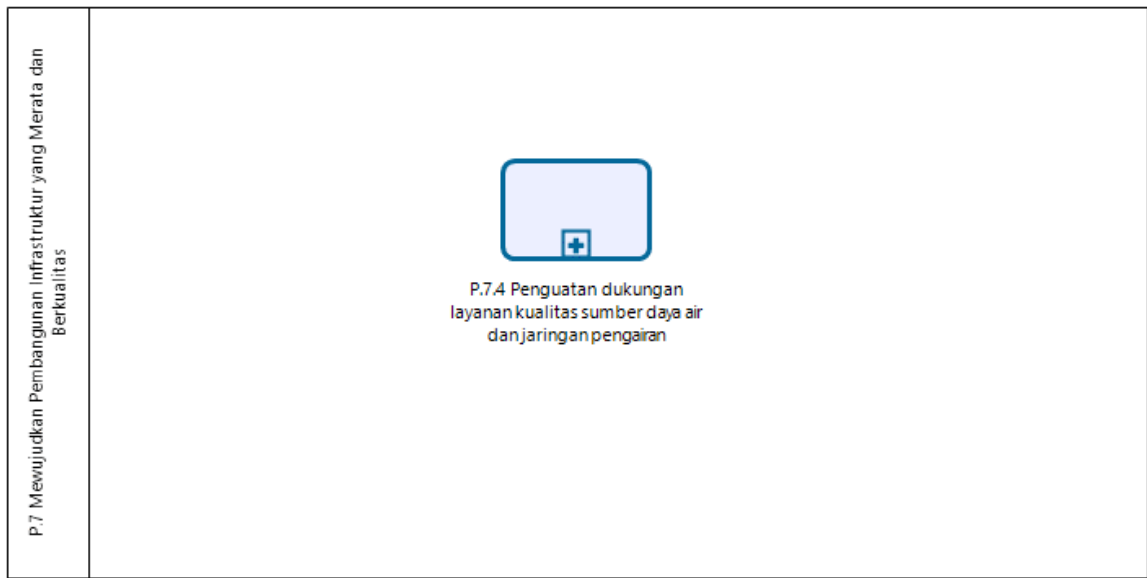
**PETA PROSES BISNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**Level 0**






**Level 1**









Level 2

P.7.4 Penguatan dukungan layanan kualitas sumber daya air dan jaringan pengairan		
	7.4.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air	
		
	7.4.2 Meningkatkan Optimalisasi pengelolaan irigasi	
		
	7.4.3 Meningkatkan kualitas pengendalian daya rusak air	

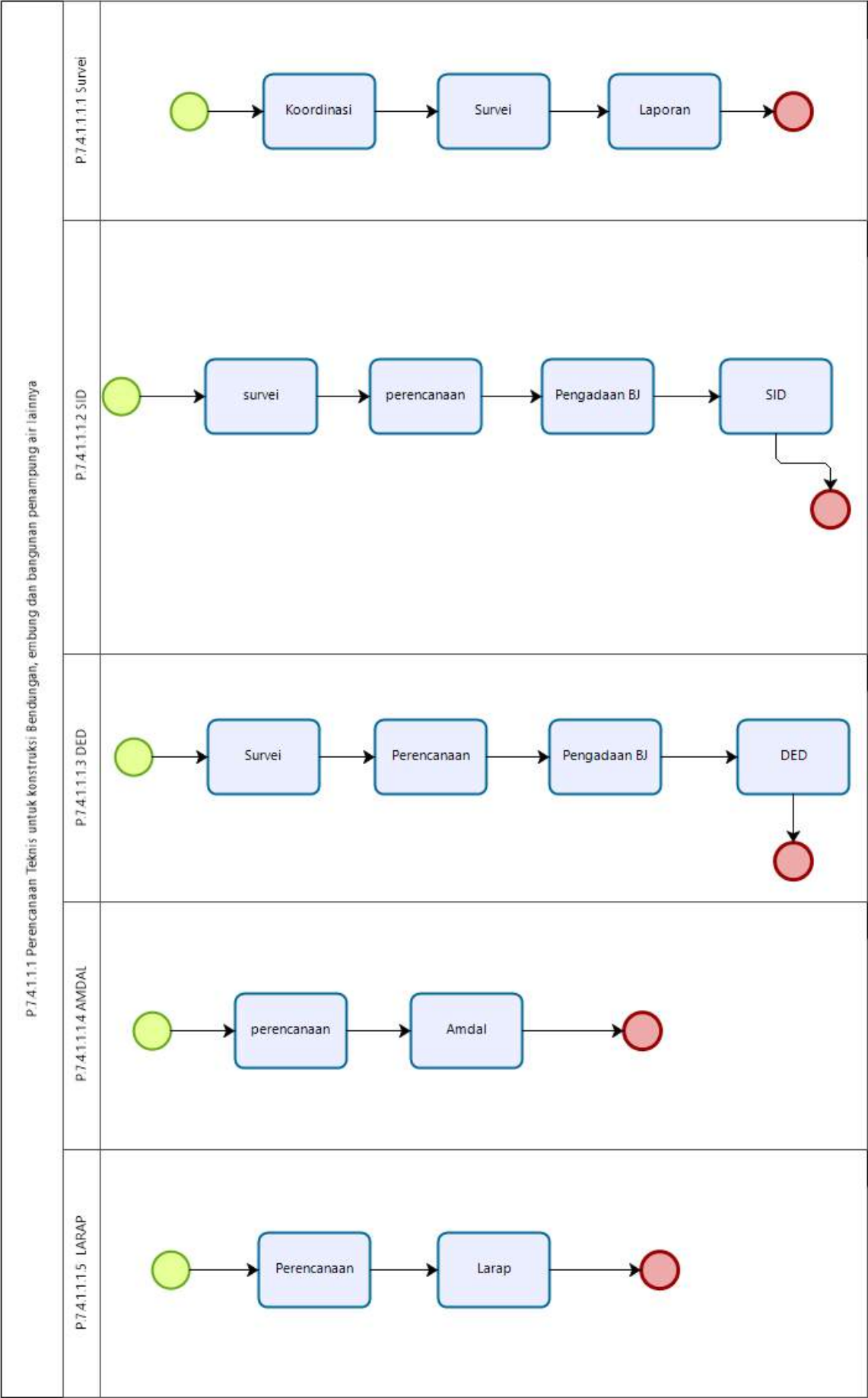
Level 3

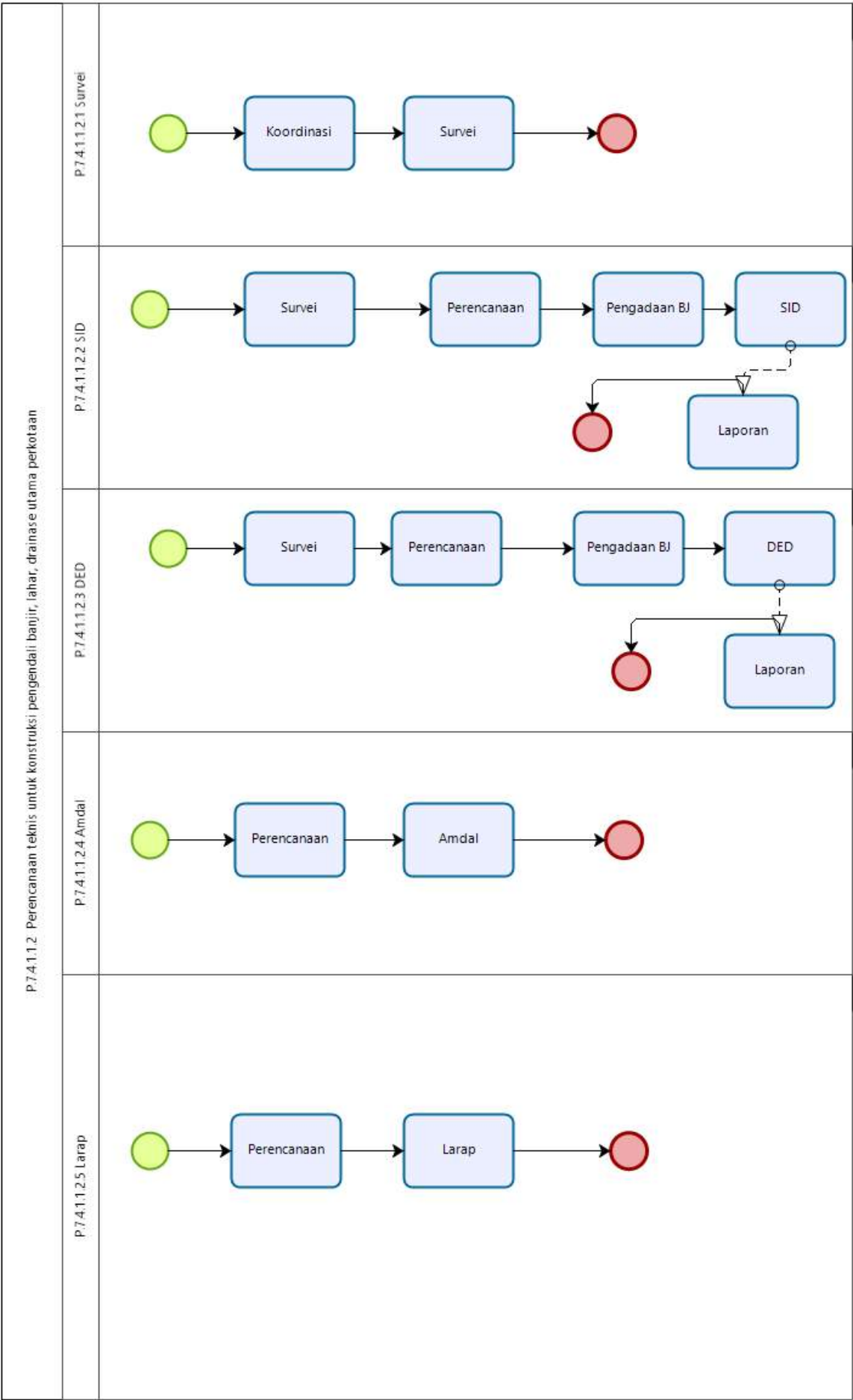
7.4.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air		
	7.4.1.1 Meningkatkan kualitas Perencanaan infrastruktur sumber daya air	
		
	7.4.1.2 Meningkatkan pengelolaan hidrologisistem informasi dan kualitas air	
		
	7.4.1.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	
		
	7.4.1.4 Meningkatkan kualitas pengendalian lahan dan aset sumber daya air	

Level 4

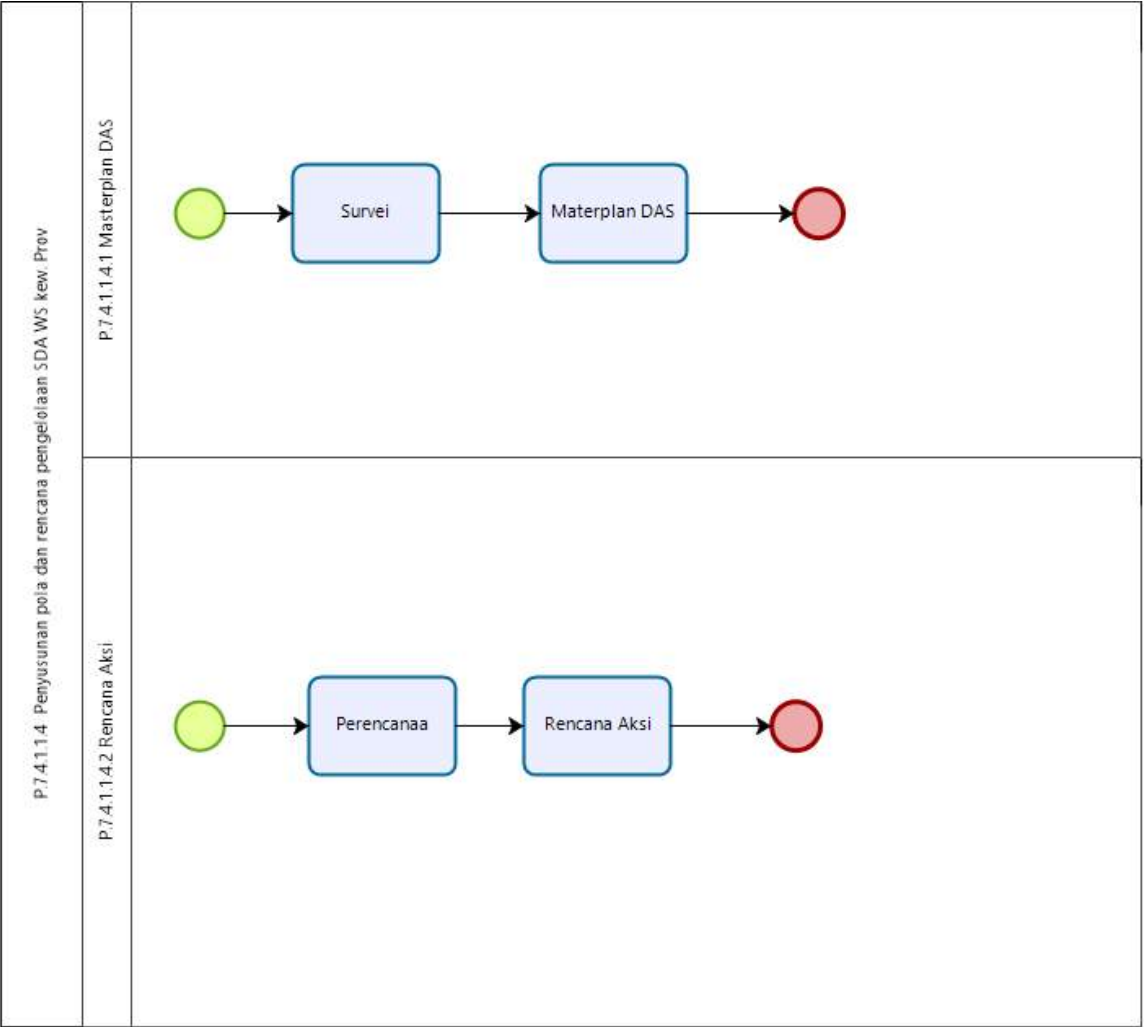
7.4.1.1 Meningkatkan kualitas Perencanaan infrastruktur sumber daya air		
	P.7.4.1.1.1 Perencanaan Teknis untuk konstruksi Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	
		
	P.7.4.1.1.2 Perencanaan teknis untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan	
		
	P.7.4.1.1.3 Pengevaluasian dan pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan SDA WS kewenangan provinsi	
		
	P.7.4.1.1.4 penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kew. Prov	

SOP

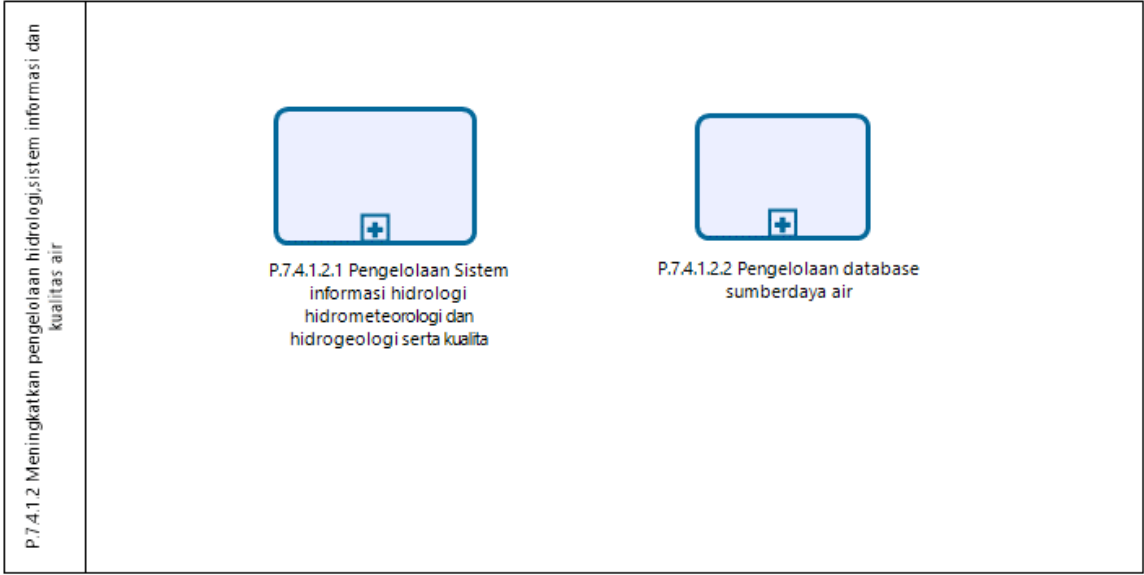





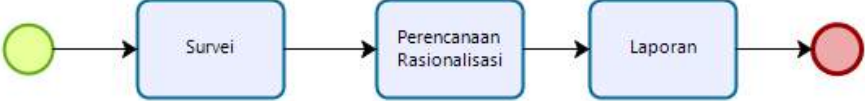
P.7.4.1.1.3 Pengevaluasian dan pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan SDA WS kewenangan provinsi	
P.7.4.1.1.3.3 Pemanfaatan Air	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; Survei[Survei]; Survei --&gt; PemanfaatanAir[Pemanfaatan Air]; PemanfaatanAir --&gt; End(( ))</pre>
P.7.4.1.1.3.2 Rekomtek Alokasi	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; Koordinasi[Koordinasi]; Koordinasi --&gt; Survei[Survei]; Survei --&gt; RekomtekAlokasi[Rekomtek alokasi]; RekomtekAlokasi --&gt; End(( ))</pre>
P.7.4.1.1.3.1 Survey	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; Koordinasi[Koordinasi]; Koordinasi --&gt; Survey[Survey]; Survey --&gt; End(( ))</pre>



**Level 4**




SOP

P.7.4.1.2.1 Pengelolaan Sistem Informasi hidrologi hidrometeorologi dan hidrogeologi serta kualita	
P.7.4.1.2.1.2 analisa data	
P.7.4.1.2.1.1 Perencanaan Rasionalisasi	


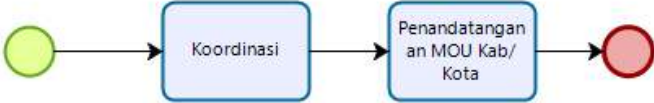
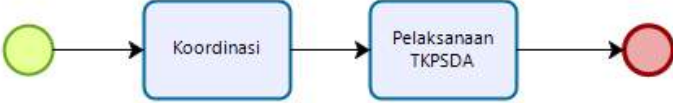
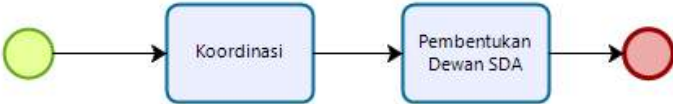
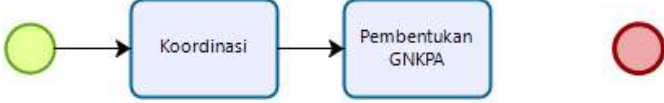
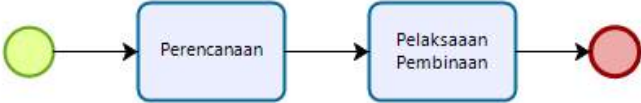


P.7.4.1.2.2 Pengelolaan database sumberdaya air	
P.7.4.1.2.2.3 Website	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; Perencanaan[Perencanaan]; Perencanaan --&gt; PengadaanBJ[Pengadaan BJ]; PengadaanBJ --&gt; Website[Website]; Website --&gt; End(( ))</pre>
P.7.4.1.2.2.4 Aplikasi Kinerja	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; Perencanaan[Perencanaan]; Perencanaan --&gt; PengadaanBJ[Pengadaan BJ]; PengadaanBJ --&gt; AplikasiKinerja[Aplikasi Kinerja]; AplikasiKinerja --&gt; End(( ))</pre>
P.7.4.1.2.2.2 PPID	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; Koordinasi[Koordinasi]; Koordinasi --&gt; PPID[PPID]; PPID --&gt; End(( ))</pre>
P.7.4.1.2.2.1 Aplikasi SDA	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; Perencanaan[Perencanaan]; Perencanaan --&gt; PengadaanBJ[Pengadaan BJ]; PengadaanBJ --&gt; AplikasiSDA[Aplikasi SDA]; AplikasiSDA --&gt; End(( ))</pre>

**Level 4**

<p>P.7.4.1.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air</p>	<div><p>P.7.4.1.3.1 koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA</p></div>
---	--

SOP

P.7.4.1.3.1 koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelenbagaan pengelolaan SDA		
P.7.4.1.3.1.1 Koordinasi		
P.7.4.1.3.1.2 Mou Kab/Kota		
P.7.4.1.3.1.3 TKPSDA		
P.7.4.1.3.1.5 Dewan SDA		
P.7.4.1.3.1.6 GNKPA		
P.7.4.1.3.1.4 Pembinaan KMPS		



Level 4

P.7.4.1.4 Meningkatkan kualitas pengendalian lahan dan aset sumber daya air	<div><div><div></div></div><div>P.7.4.1.4.1 koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan aset dan lahan sumberdaya air</div></div>
---	---



SOP

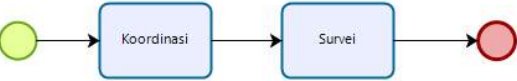
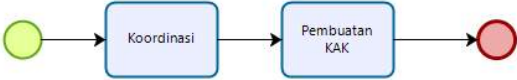
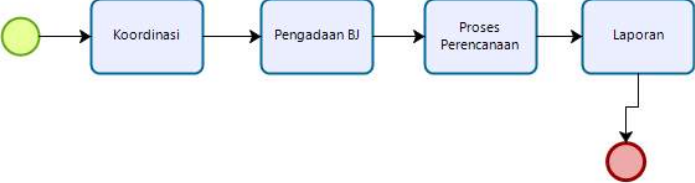
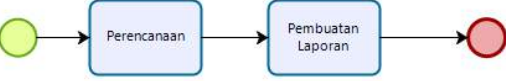
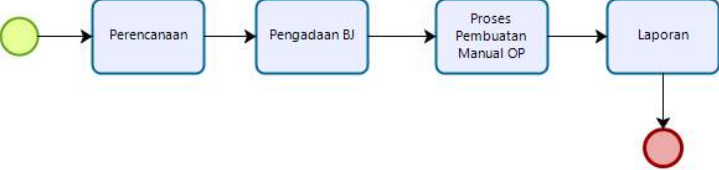
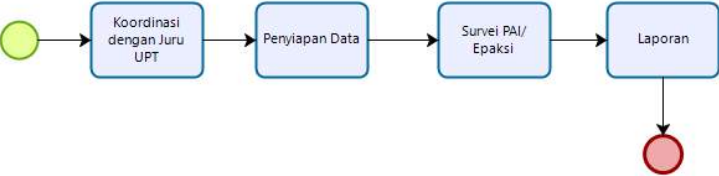
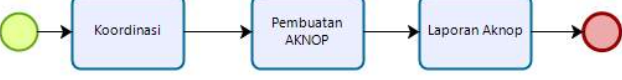

P.7.4.1.4.1 koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan aset dan lahan sumberdaya air	P.7.4.1.4.1.1 Rekomtek Perijinan	<div><div><div></div></div><div>Koordinasi</div><div>Survei</div><div>Terbit rekomtek perijinan</div><div></div></div>
	P.7.4.1.4.1.2 Penertiban Lahan	<div><div><div></div></div><div>Koordinasi</div><div>Penertiban Lahan</div><div></div></div>
	P.7.4.1.4.1.3 Pencatatan Aset	<div><div><div></div></div><div>Survei</div><div>Pencatatan Aset</div><div></div></div>

Level 3

P.7.4.2 Meningkatkan Optimalisasi pengelolaan irigasi	<div><div><p>P.7.4.2.1 Meningkatkan persentase kondisi fisik prasarana irigasi</p></div><div><p>P.7.4.2.2 Meningkatkan kualitas operasional jaringan sumber daya air</p></div></div>
---	---

Level 4

P.7.4.2.1 Meningkatkan persentase kondisi fisik prasarana irigasi	<div><div><p>P.7.4.2.1.1 Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan</p></div><div><p>P.7.4.2.1.2 Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dan Bangunan Utama</p></div></div>
---	--

P7.42.1.1 Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	P7.42.1.1.1 Survei	
	P7.42.1.1.2 KAK	
	P7.42.1.1.3 Perencanaan	
	P7.42.1.1.4 Laporan	
	P7.42.1.1.5 Manual OP	
	P7.42.1.1.6 PAI/ Epaksi	
	P7.42.1.1.7 AKNOP	
	P7.42.1.1.8 BCP	



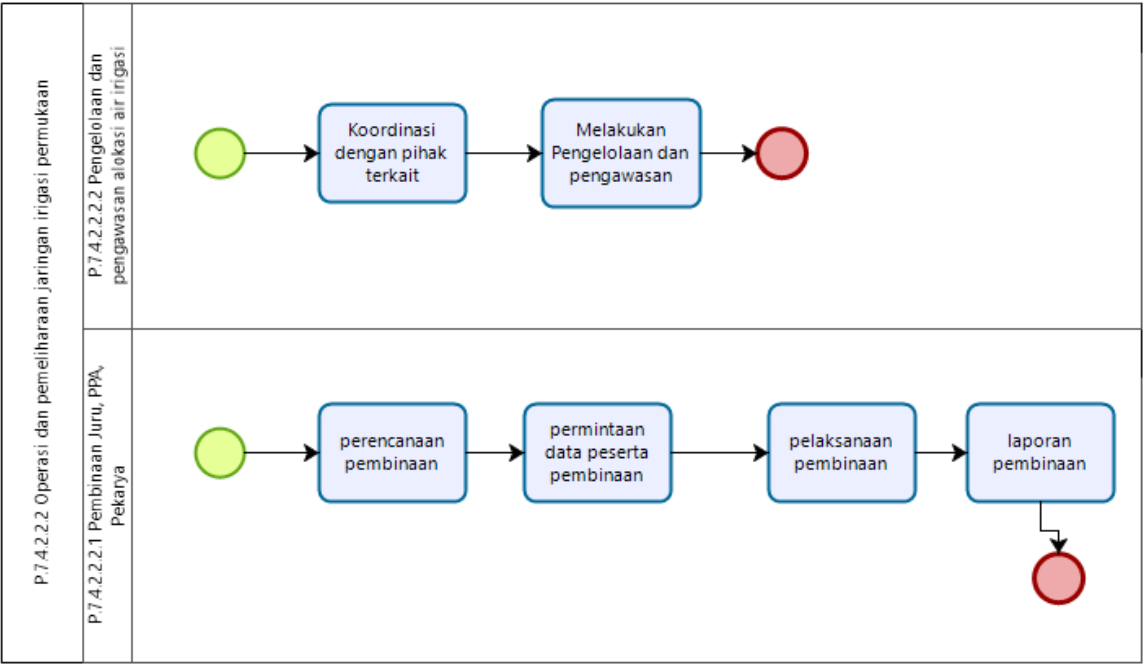
P7.4.2.1.2 Perencanaan dan reabilitasi jaringan irigasi permukaan dan Bangunan Utama	
P7.4.2.1.2.1 Perencanaan jaringan irigasi tanah permukaan	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; A[Survei Kerusakan Saluran]; A --&gt; B[Perencanaan Pemeliharaan]; B --&gt; C[Pengadaan BI]; C --&gt; D[Pemeliharaan Saluran]; D --&gt; E[Laporan Pemeliharaan]; E --&gt; End(( ))</pre>
P7.4.2.1.2.2 Survei	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; A[Koordinasi]; A --&gt; B[Survei]; B --&gt; End(( ))</pre>
P7.4.2.1.2.3 Analisa Hasil Survei	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; A[Pengumpulan Data]; A --&gt; B[Analisa Hasil survei]; B --&gt; C[Laporan]; C --&gt; End(( ))</pre>
P7.4.2.1.2.4 KAK	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; A[Koordinasi]; A --&gt; B[Pengumpulan Data]; B --&gt; C[Pembuatan KAK]; C --&gt; End(( ))</pre>
P7.4.2.1.2.5 Perencanaan	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; A[Koordinasi]; A --&gt; B[Pembuatan HPS, KAK, Spektak, Rancangan Kontrak]; B --&gt; C[Pengadaan BI]; C --&gt; D[Proses Perencanaan]; D --&gt; E[Laporan perencanaan]; E --&gt; End(( ))</pre>
P7.4.2.1.2.6 Pengadaan BI	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; A[Pembuatan HPS, KAK, Spektak, Rancangan Kontrak dan Gambar (Rak)]; A --&gt; B[Buat Paket dan Upload Dokumen pada LPSE]; B --&gt; C[Kirim Paket pada Pejabat Pengadaan]; C --&gt; D[Pembuatan Jadwal pengadaan]; D --&gt; E[Klarifikasi dan Negosiasi]; E --&gt; F[Penetapan pemenang]; F --&gt; End(( ))</pre>
P7.4.2.1.2.7 Perbaikan jaringan irigasi tanah permukaan	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; A[Survei Kerusakan Saluran]; A --&gt; B[Perencanaan Pemeliharaan]; B --&gt; C[Pengadaan BI]; C --&gt; D[Pemeliharaan Saluran]; D --&gt; E[Laporan Pemeliharaan]; E --&gt; End(( ))</pre>
P7.4.2.1.2.8 Irigasi air tanah	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; A[Survei]; A --&gt; B[Jaringan Irigasi Air Tanah]; B --&gt; End(( ))</pre>
P7.4.2.1.2.9 jaringan irigasi pompa	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; A[Survei]; A --&gt; B[Jaringan Irigasi Pompa]; B --&gt; End(( ))</pre>
P7.4.2.1.2.10 jaringan irigasi tambak	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; A[Survei]; A --&gt; B[Jaringan Irigasi Tambak]; B --&gt; End(( ))</pre>
P7.4.2.1.2.1 Data jaringan saluran dan bangunan	<pre>graph LR; Start(( )) --&gt; A[Survei]; A --&gt; B[Pembuatan Rekap Data]; B --&gt; End(( ))</pre>

**Level 4**

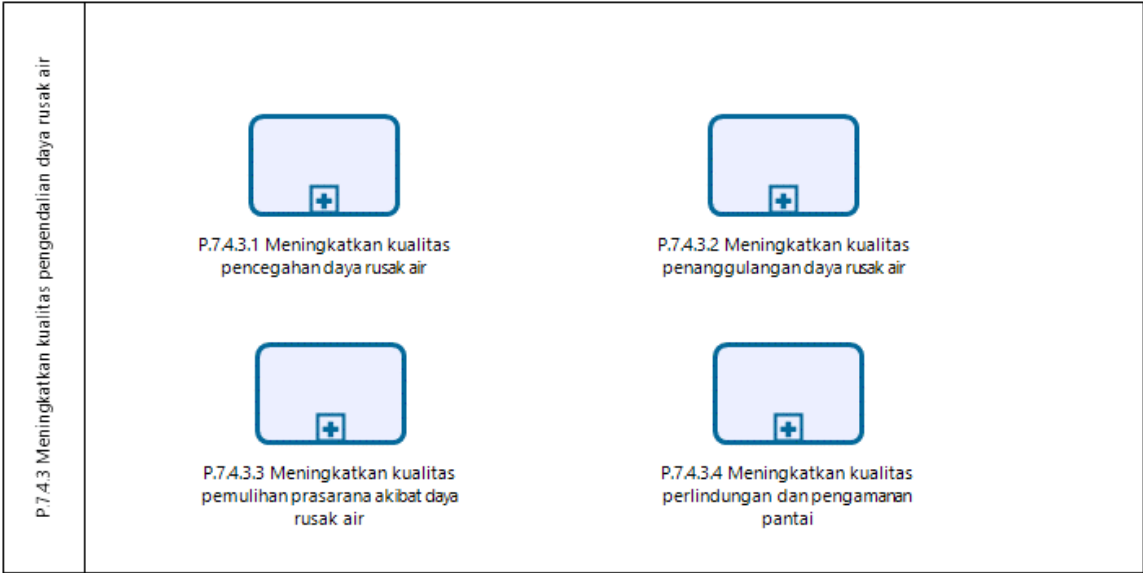
P.7.4.2 Meningkatkan kualitas operasional jaringan sumber daya air	<div><div></div><div>P.7.4.2.2.1 pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan provinsi</div></div> <div><div></div><div>P.7.4.2.2.2 operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan</div></div>
--	---

SOP

P.7.4.2.2.1 pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan provinsi	P.7.4.2.2.1.5 RTTD	<pre>graph LR; A(( )) --&gt; B[Koordinasi dengan Kota/ Kabupaten]; B --&gt; C[Pengumpulan data Realisasi RTTD]; C --&gt; D(( )];</pre>
	P.7.4.2.2.1.4 RTTG	<pre>graph LR; A(( )) --&gt; B[Koordinasi dengan Kab/ Kota]; B --&gt; C[Pengumpulan data realisasi RTTG]; C --&gt; D(( )];</pre>
	P.7.4.2.2.1.3 GHIPPA	<pre>graph LR; A(( )) --&gt; B[pengumpulan data Ghippa Kab/ Kota]; B --&gt; C[Koordinasi dengan GHIPPA]; C --&gt; D(( )];</pre>
	P.7.4.2.2.1.2 HIPPA	<pre>graph LR; A(( )) --&gt; B[Pengumpulan data HIPPA Kab/ Kota]; B --&gt; C[Koordinasi dengan HIPPA]; C --&gt; D(( )];</pre>
	P.7.4.2.2.1.1 Komisi Irigasi	<pre>graph LR; A(( )) --&gt; B[Koordinasi dengan Kab/ Kota dan Kementrian]; B --&gt; C[Mengadakan Pertemuan dengan maksud pembentukan komisi Irigasi]; C --&gt; D(( )];</pre>



**Level 3**

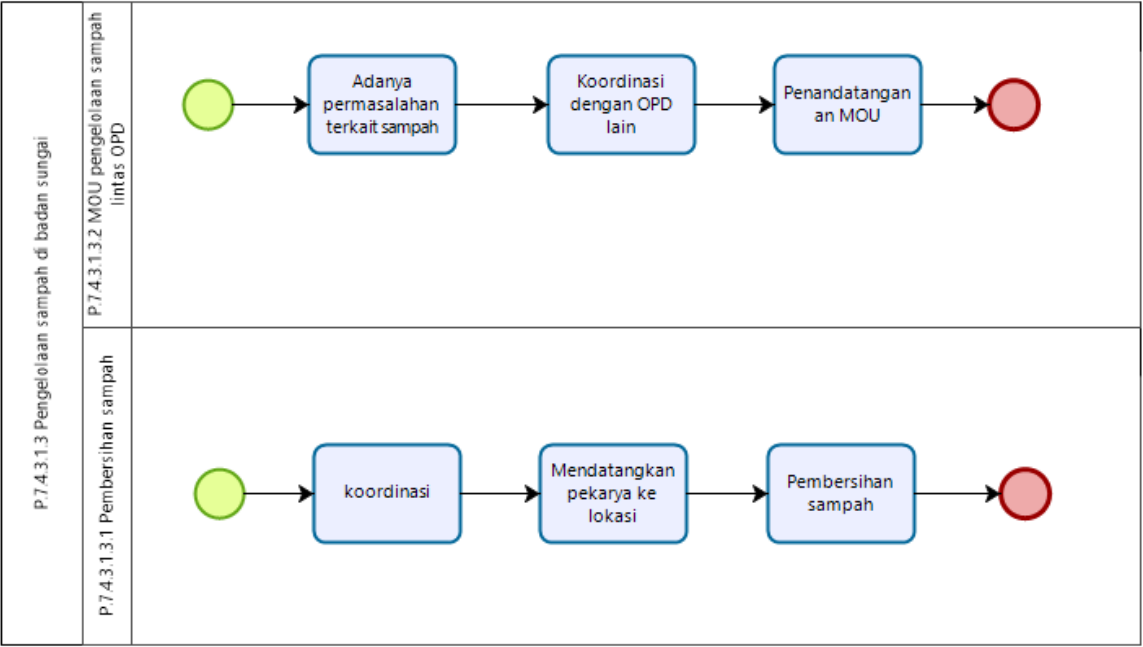


Level 4

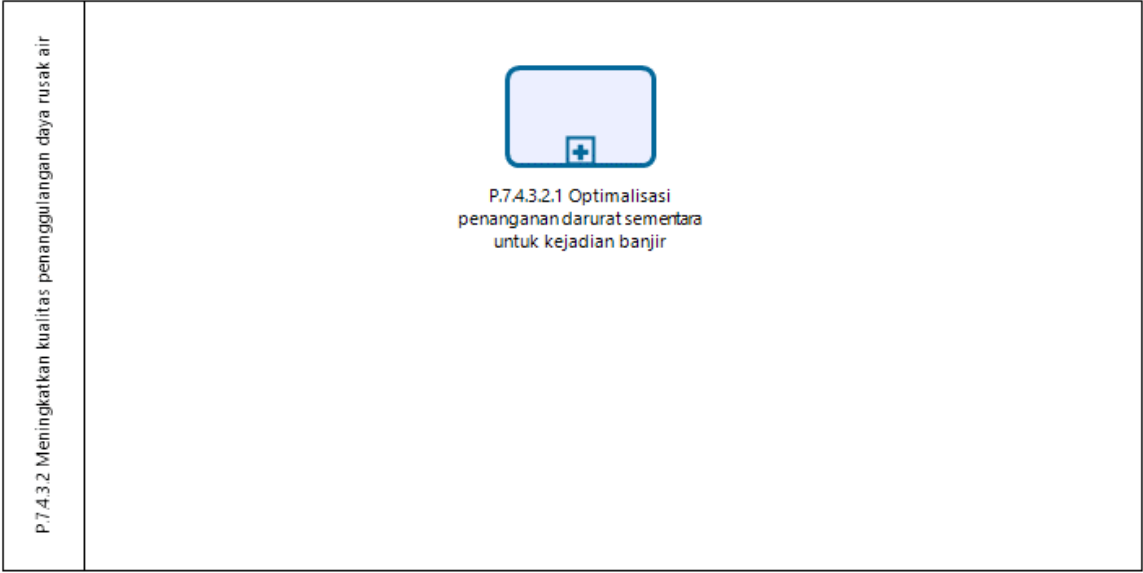
P.7.4.3.1 Meningkatkan kualitas pencegahan daya rusak air	<div><div><div></div><div>P.7.4.3.1.1 Pembangunan Flood Forecasting and warning system (FFWS)</div></div><div><div></div><div>P.7.4.3.1.2 Normalisasi/restorasi/pemeliharaan sungai</div></div><div><div></div><div>P.7.4.3.1.3 Pengelolaan sampah di badan sungai</div></div></div>
---	--

SOP

P.7.4.3.1.1 Pembangunan Flood Forecasting and warning system (FFWS)	P.7.4.3.1.1.2 Pemantauan realtime	<div><div></div><div>Koordinasi dengan petugas</div><div>Pemantauan sesuai waktu</div><div></div></div>
	P.7.4.3.1.1.1 Sistem Peringatan dini	<div><div></div><div>Pemantauan berkala</div><div>melakukan sistem peringatan dini apabila tinggi muka air melebihi normal via aplikasi</div><div></div></div>
P.7.4.3.1.2 Normalisasi/restorasi/pemeliharaan sungai	P.7.4.3.1.2.1 Pengerukan sedimen depo peralatan	<div><div></div><div>Pengumpulan data sungai yang memerlukan pengerukan sedimen dari UPT</div><div>Survei Lokasi</div><div>Pelaksanaan Pengerukan Sedimen</div><div>Laporan Pelaksanaan</div><div></div></div>

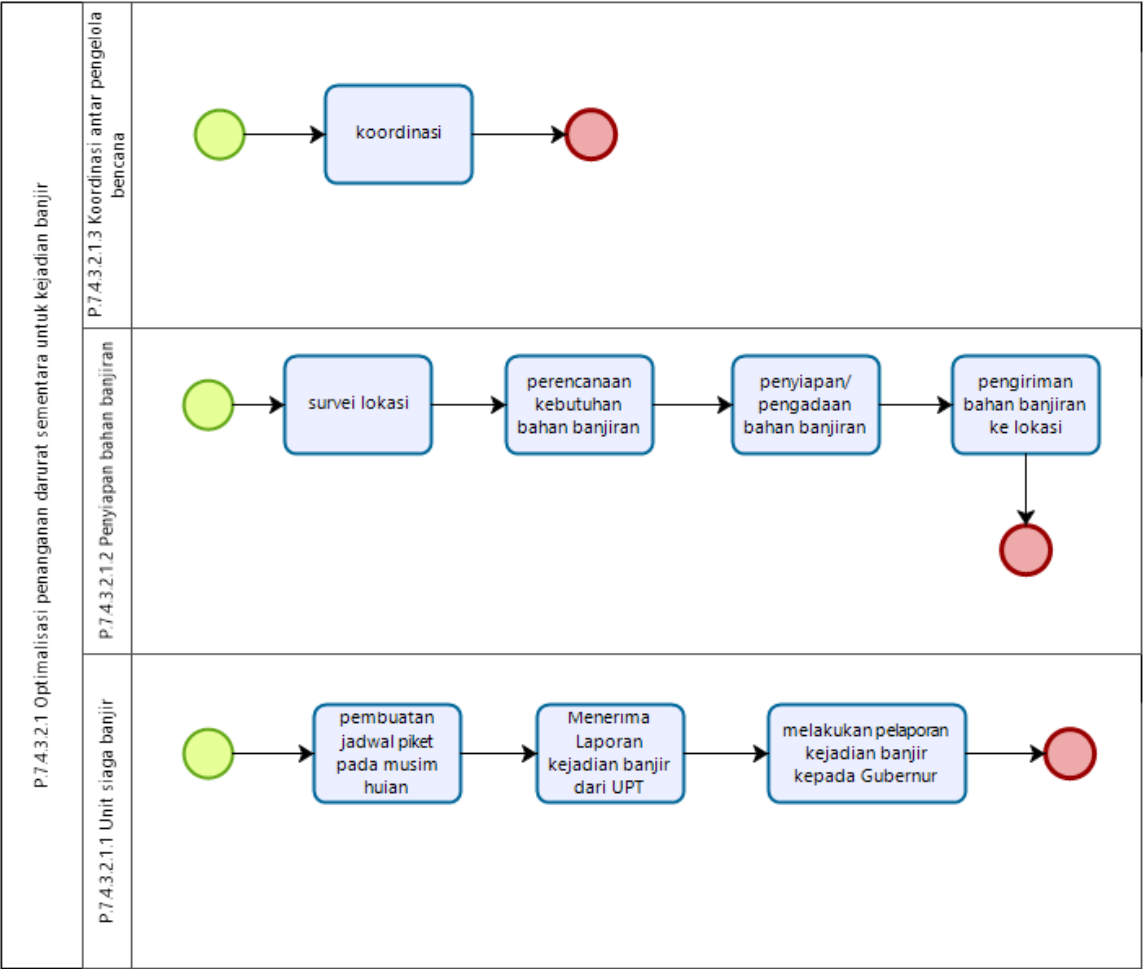


**Level 4**





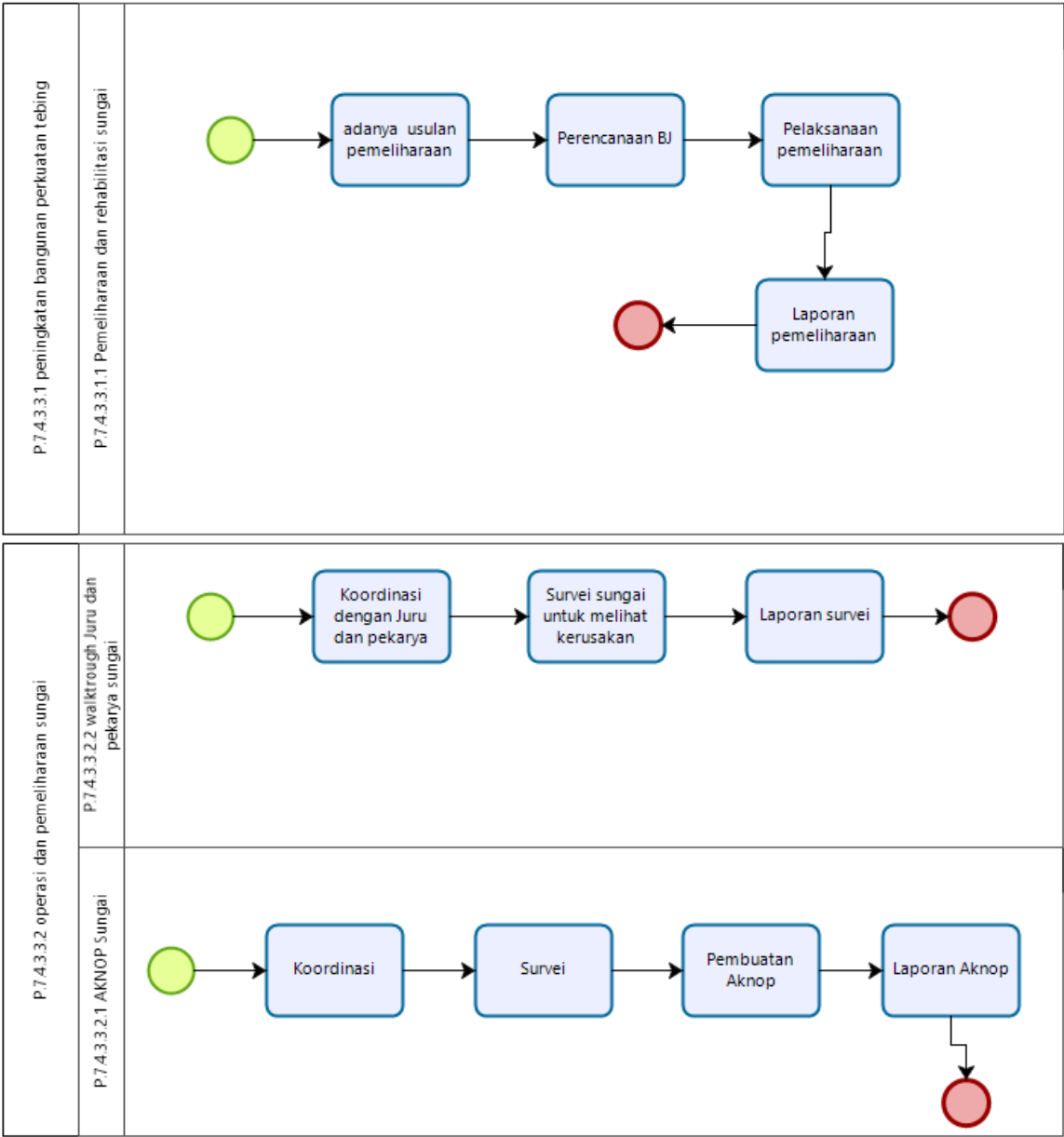
SOP



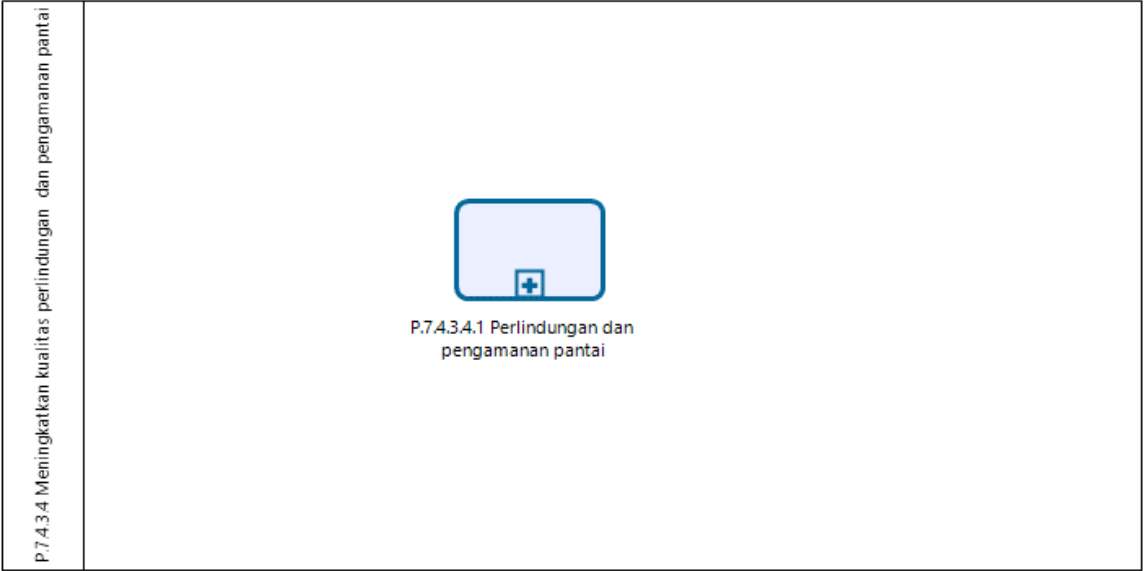
Level 4



SOP



Level 4



SOP

